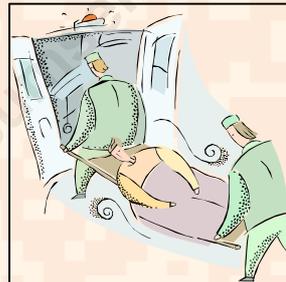


INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SUMATERA SELATAN 2006



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan
2008**

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN
2006**

<http://www.sumsel.bps.go.id>



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan
2008**

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN
2006**

Katalog BPS: 4103.16
Nomor Publikasi: 16522.08.01

Penulis:
Faharuddin, M.Si.

Editor:
M. Haslani Haris, M.A.
Dyah Anugrah K., M.A.

Diterbitkan Oleh:
**Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan**

Dicetak Oleh:
CV Kreasi Rifi

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 adalah merupakan publikasi yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan para pengguna data utamanya para perencana pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah. Keterangan yang dikumpulkan menyangkut berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi penduduk, antara lain mengenai kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumahtangga, perumahan dan sosial lainnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terbitnya publikasi ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saran dan kritik dari pembaca sangatlah kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang. Akhirnya, semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para konsumen data.

Palembang, Oktober 2008
**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
SUMATERA SELATAN**

M. HASLANI HARIS, MA
NIP. 340004309

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
I. TINJAUAN UMUM	
Ruang Lingkup	1
Perkembangan Taraf Kesejahteraan	1
Penduduk Miskin	3
II. KEPENDUDUKAN	
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	7
Persebaran dan Kepadatan Penduduk	10
Fertilitas	14
III. KESEHATAN	
Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	18
Pemberian ASI dan Imunisasi	21
Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	23
IV. PENDIDIKAN	
Angka Melek Huruf	32
Rata-rata Lama Sekolah	34
Tingkat Pendidikan	36
Partisipasi Sekolah	39
Fasilitas Pendidikan	42
V. KETENAGAKERJAAN	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	44
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	45
Lapangan Usaha Utama	48
Status Pekerjaan	49
Jumlah Jam Kerja	50

VI. TARAF DAN POLA KONSUMSI	
Perkembangan Penduduk Miskin	52
Taraf Konsumsi Energi dan protein	54
Perkembangan Tingkat Kesejahteraan	55
Perkembangan Distribusi Pendapatan	56
Pengeluaran Rumahtangga	58
VII. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	
Kualitas Rumah Tinggal	60
Fasilitas Rumah Tinggal	63

<http://www.sumsel.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1996 – 2006	3
Tabel 1.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 1999 – 2006	4
Tabel 1.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1999 – 2006	5
Tabel 2.1	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Sumatera Selatan Tahun 1971-2006	8
Tabel 2.2	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000-2006	9
Tabel 2.3	Kepadatan Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000-2006	11
Tabel 2.4	Persentase Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Tanggungan Tahun 1980-2006	12
Tabel 2.5	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Angka Beban Tanggungan Tahun 2006	13
Tabel 2.6	Beberapa Indikator Fertilitas Sumatera Selatan	15
Tabel 2.7	Persentase Wanita Menurut Umur Perkawinan Pertama, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1995, 2000, 2005 dan 2006	16
Tabel 2.8	Persentase Wanita Menurut Umur Perkawinan Pertama Menurut Kabupaten/Kota 2006	17
Tabel 3.1	Angka Kematian Bayi dan Anak serta Angka Harapan Hidup Sumatera Selatan	19
Tabel 3.2	Angka Kesakitan Dan Rata-Rata Lama Sakit Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2005-2006	20
Tabel 3.3	Rata-Rata Lama(Bulan) Balita Mendapat ASI Menurut Kabupaten/ Kota dan Daerah Tempat Tinggal, 2005-2006	21
Tabel 3.4	Rata-rata Frekuensi Imunisasi Balita Menurut Jenis Imunisasi dan Daerah Tempat Tinggal, 2005-2006	22
Tabel 3.5	Rata-rata Frekuensi Imunisasi Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, 2006	23

Tabel 3.6	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Tahun 2004 – 2006	24
Tabel 3.7	Persentase Bayi Menurut Penolong Persalinan dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006	25
Tabel 3.8	Persentase Bayi Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan, 2006	27
Tabel 3.9	Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Jenis/Cara Pengobatan Yang Digunakan, 2005 – 2006	28
Tabel 3.10	Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Kabupaten/Kota Jenis/Cara Pengobatan Yang Digunakan, 2006	29
Tabel 3.11	Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006	30
Tabel 3.12	Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat, 2006	31
Tabel 4.1	Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006	33
Tabel 4.2	Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2006	34
Tabel 4.3	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2005 – 2006	35
Tabel 4.4	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2006	36
Tabel 4.5	Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2005 – 2006	37
Tabel 4.6	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2006	38
Tabel 4.7	Angka Partispasi Sekolah Menurut Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006	39
Tabel 4.8	Angka Partispasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2006	40
Tabel 4.9	Angka Partispasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006	41
Tabel 4.10	Angka Partispasi Murni Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2006	

Tabel 4.11	Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan, 2003/2004 – 2005/2006	43
Tabel 5.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006	44
Tabel 5.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006	46
Tabel 5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan dan , 2005 – 2006	47
Tabel 5.4	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006	48
Tabel 5.5	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006	50
Tabel 5.6	Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang dari 35 Jam Seminggu Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006	51
Tabel 6.1	Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Berbagai Indikator dan Daerah Tempat Tinggal, 2002 – 2005	53
Tabel 6.2	Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 dan 2005	55
Tabel 6.3	Beberapa Indikator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 dan 2005	56
Tabel 6.4	Distribusi Pembagian Pengeluaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 dan 2005	57
Tabel 6.5	Persentase Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 dan 2005	59
Tabel 7.1	Persentase Rumah tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, 2004 – 2006	61
Tabel 7.2.	Persentase Rumah tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2006	62
Tabel 7.3	Persentase Rumah tangga Menurut Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, 2004 – 2006	64
Tabel 7.4	Persentase Rumah tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan, 2006	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1996 – 2006	2
Gambar 1.1 Jumlah (Dalam Ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1999 – 2006	4
Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan 1971 – 2006	8
Gambar 2.2. Angka Benan Tanggungan Provinsi Sumatera Selatan 1980 – 2006	12
Gambar 3.1. Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera Selatan	19
Gambar 3.2. Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Puskesmas dan Pustu 2005 - 2006	24
Gambar 3.3. Persentase Bayi menurut Penolong Persalinan Provisis Sumatera Selatan 2005 – 2006	26
Gambar 4.1. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 2005 – 2006	37
Gambar 5.1. TPT Menurut Pendidikan 2005 – 2006	47
Gambar 5.2. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama 2005 -2006	49
Gambar 6.1 Gini Ratio Menurut Daerah, 2005 – 2006	58

I. TINJAUAN UMUM

1.1 Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan gambaran mengenai taraf kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan, perkembangannya antar waktu serta perbandingannya antar kabupaten/kota. Untuk mengukur taraf kesejahteraan rakyat digunakan indikator dampak. Publikasi ini juga menyajikan indikator-indikator input, proses, dan output untuk memberikan gambaran tentang investasi dari berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat serta proses dan manfaat dari program tersebut pada tingkat individu, keluarga, dan penduduk. Antara indikator input dan indikator dampak tidak selalu sejalan. Penjelasannya sederhana; input atau investasi dalam suatu program hanya akan memberikan dampak yang diharapkan jika implementasi program berjalan secara benar. Oleh karena itu kesenjangan antara input dan dampak suatu program kesejahteraan rakyat sebaiknya dilihat sebagai pertanda adanya kekeliruan dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat.

Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat (*visible*) jika dilihat dari suatu aspek tertentu. Oleh karena itu dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang spesifik yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga, dan perumahan. Setiap aspek disajikan secara terpisah dan merupakan bab tersendiri. Selain itu, tidak semua permasalahan kesejahteraan rakyat dapat diamati dan atau dapat diukur. Publikasi ini hanya menyajikan permasalahan kesejahteraan rakyat dapat diamati dan dapat diukur (*measurable welfare*) baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit.

1.2 Perkembangan Taraf

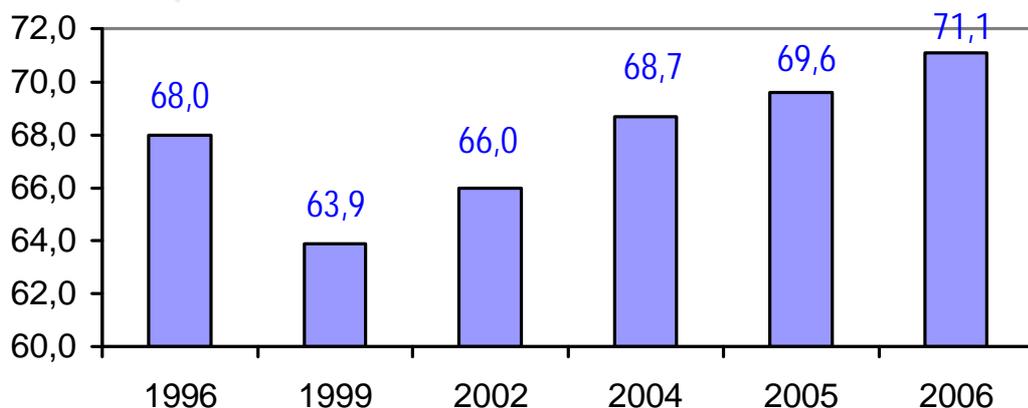
Taraf kesejahteraan rakyat masyarakat Sumatera Selatan secara umum mengalami peningkatan yang berarti dari waktu ke waktu sampai tahun 2006. Peningkatan itu terjadi dalam konteks demografis di mana penduduk walaupun masih bertambah jumlahnya tetapi kecepatan pertumbuhannya terus berkurang sebagai akibat turunnya angka kelahiran. Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate* disingkat TFR) per wanita pada

periode 1980 sekitar 5,56. Angka itu hanya tinggal separuhnya (sebesar 2,2) pada tahun 2005. Peningkatan taraf kesejahteraan rakyat Indonesia antara lain dilihat dari dua indikator yang berdampak untuk bidang kesehatan dan pendidikan yaitu kenaikan angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah.

- Selama kurun 1995-2005 angka harapan hidup bertambah sebesar 6,9 tahun dari 63,7 tahun pada tahun 1995 menjadi 70,6 tahun pada tahun 2005. Sedangkan dalam kurun waktu yang sama angka kematian bayi turun dari 54 menjadi 27 per 1.000 kelahiran.
- Selama kurun 1996-2006 rata-rata lama sekolah naik 1,5 tahun dari 6,1 tahun pada tahun 1996 menjadi 7,6 tahun pada tahun 2006.

Dalam hal pengukuran secara komposit, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk memotret tingkat dan perkembangan kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu dan antar kabupaten/kota. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa IPM di Sumatera Selatan terus meningkat selama periode 1999-2006, yaitu dari 63,90 pada tahun 1999 menjadi 71,09 pada tahun 2006. Peningkatan ini terjadi tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu terus membaik.

Gambar 1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Sumatera Selatan 1999 -2006



Tabel. 1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1996 – 2006

Kabupaten/Kota	1996	1999	2002	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu ¹⁾	68,6	64,7	66,6	69,3	69,9	70,9
(02) Ogan Komering Ilir ²⁾	64,0	59,8	63,1	68,1	68,8	69,0
(03) Muara Enim	66,8	63,1	64,2	68,1	68,7	69,1
(04) Lahat	64,9	63,1	65,1	67,2	67,6	68,4
(05) Musi Rawas	63,8	60,4	62,0	64,4	65,0	65,6
(06) Musi Banyuasin	61,9	53,8	64,6	68,1	68,7	69,0
(07) Banyuasin				66,7	67,2	68,1
(08) OKU Selatan				67,9	68,8	70,0
(09) OKU Timur				65,1	65,4	67,5
(10) Ogan Ilir				65,6	66,0	67,2
(71) Palembang	72,2	68,3	71,2	73,1	73,6	74,3
(72) Prabumulih				70,7	71,1	71,7
(73) Pagaralam				69,5	69,9	71,1
(74) Lubuklinggau				65,8	66,3	68,0
Sumatera Selatan	68,0	63,9	66,0	68,7	69,6	71,1

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

1.3 Penduduk Miskin

Untuk melihat indikasi lain dari adanya perbaikan taraf kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin sampai dengan tahun 2006 seperti yang tertera pada Tabel 1.2 di bawah ini. Pada tahun 1999, jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan diperkirakan mencapai 1,5 juta atau 23,87 persen dan pada tahun 2006 jumlahnya diperkirakan turun menjadi 1,4 juta (20,99 persen).

Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 1999 – 2006

Tahun	Jumlah (000 Jiwa)	Persentase
(1)	(2)	(3)
1996	1.017,7	17,04
1999	1.481,9	23,87
2002	1.434,1	22,49
2003	1.397,1	21,54
2004	1.379,3	20,92
2005	1.429,0	21,01
2006	1.446,9	20,99

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Perkembangan jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota periode 1999 – 2006 disajikan pada Tabel 1.3. Secara umum jumlah maupun persentase penduduk miskin di kabupaten/kota Sumatera Selatan telah mengalami penurunan pada periode tersebut. Sampai tahun 2003 hanya Kota Palembang yang mempunyai persentase penduduk miskin kurang dari 10 persen, bahkan di Kabupaten Lahat, Musi Rawas dan Musi Banyuasin pada tahun 2003 mempunyai persentase penduduk miskin yang cukup besar, di atas 30 persen. Namun demikian, pada tahun 2006 terdapat 2 kota yang mempunyai persentase penduduk miskin kurang dari 10 persen yaitu Kota Palembang (9,23 persen) dan Kota Prabumulih (9,33 persen). Demikian juga kabupaten yang mempunyai persentase penduduk miskin di atas 30 persen telah berkurang menjadi 2 kabupaten yaitu Musi Rawas dan Musi Banyuasin.

Tabel 1.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1999 – 2006

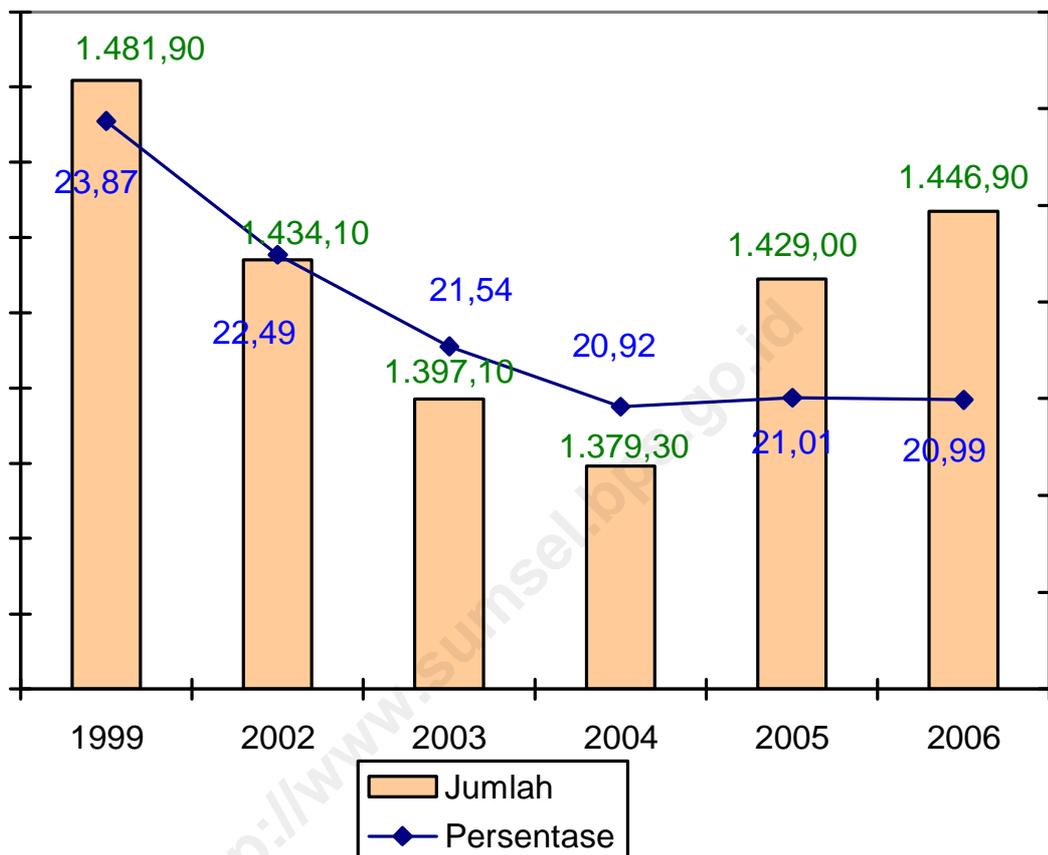
Kabupaten/Kota	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin					
	1999	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu	325,5 (30,70)	227,9 (21,14)	195,7 (17,89)	201,4 (18,16)	45,2 (17,59)	46,1 (17,80)
(02) Ogan Komering Ilir	279,7 (30,43)	224,3 (23,33)	220,0 (22,43)	218,9 (22,02)	161,6 (24,47)	174,1 (25,93)
(03) Muara Enim	150,5 (21,77)	160,9 (22,23)	147,0 (24,18)	138,3 (22,34)	140,3 (22,03)	140,7 (21,88)
(04) Lahat	110,5 (17,55)	179,5 (28,20)	159,1 (30,08)	160,2 (29,61)	162,6 (29,57)	163,1 (29,67)
(05) Musi Rawas	91,1 (15,34)	202,4 (32,86)	165,1 (35,85)	164,0 (35,40)	166,4 (34,82)	166,9 (34,49)
(06) Musi Banyuasin	419,6 (39,31)	316,8 (28,76)	164,4 (37,20)	164,4 (36,39)	171,3 (36,28)	171,8 (35,52)
(07) Banyuasin			156,4 (22,80)	147,3 (20,86)	149,5 (20,22)	149,9 (19,81)
(08) OKU Selatan					58,8 (18,42)	67,8 (21,06)
(09) OKU Timur					102,8 (18,38)	103,1 (18,26)
(10) Ogan Ilir					85,5 (23,75)	82,7 (22,67)
(71) Palembang	105,1 (8,43)	122,3 (9,71)	125,2 (9,75)	124,1 (9,57)	125,9 (9,35)	126,3 (9,23)
(72) Prabumulih			16,5 (13,29)	15,8 (12,41)	15,5 (11,83)	12,3 (9,33)
(73) Pagar Alam			18,1 (16,26)	16,9 (14,91)	15,2 (13,20)	13,7 (11,88)
(74) Lubuk Linggau			29,6 (17,80)	28,0 (16,42)	28,4 (16,11)	28,5 (16,01)
Sumatera Selatan	1.481,9 (23,87)	1.434,1 (22,49)	1.397,1 (21,54)	1.379,3 (20,92)	1.429,0 (21,01)	1.446,9 (20,99)

Catatan :

- 1). Jumlah Penduduk Miskin dalam ribu jiwa
- 2). Angka dalam Kurung menunjukkan persentase

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 1.2. Jumlah (Dalam Ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan 1999 -2006



II. KEPENDUDUKAN

Masalah kependudukan yang antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan, tetapi dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika mempunyai kualitas yang rendah. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Di samping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2006 jumlah penduduk Sumatera Selatan sudah mencapai 6,918 juta jiwa, yang menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi ke-9 terbesar penduduknya di Indonesia. Secara absolut jumlah penduduk Sumatera Selatan terus bertambah dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 1971 jumlah penduduk sebesar 2,931 juta jiwa, meningkat menjadi 3,975 pada tahun 1980, 5,493 juta jiwa pada tahun 1990, 6,273 pada tahun 2000 serta pada tahun 2006 menjadi 6,918 juta jiwa.

Dengan jumlah penduduk yang begitu besar maka Sumatera Selatan dihadapkan kepada suatu masalah kependudukan yang sangat serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan.

Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah, namun secara relatif laju pertumbuhan terus mengalami penurunan diantaranya melalui program KB. Selama periode 1971-1980 laju pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan mencapai 3,45 persen per tahun turun menjadi 3,29 per tahun pada periode 1980-1990, pada tahun 1990-2000 pertumbuhan penduduk menjadi 1,36 persen per tahun. Berdasarkan hasil Supas 2005 dan

Susenas 2006, pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan sedikit meningkat pada periode 2005-2006 menjadi 1,85 persen per tahun

Tabel 2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Sumatera Selatan Tahun 1971-2006

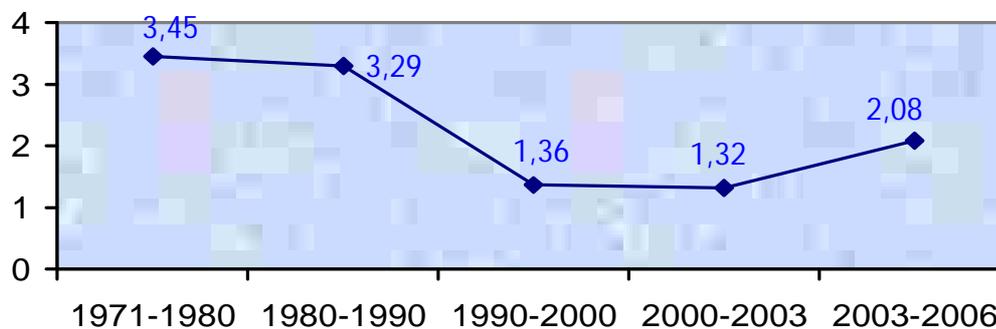
Tahun	Jumlah Penduduk	Tingkat Pertumbuhan Per Tahun (%)	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1971(SP 1971)	2.930.830	-	34
1980 (SP 1980)	3.975.904	3,45	46
1990 (SP 1990)	5.492.993	3,29	63
2000 (SP 2000)	6.272.690	1,36	72
2003 (P4B)	6.503.918	1,32	75
2005 (Supas)	6.767.645	2,08	78
2006	6.917.881		79

Catatan:

- 1) Tahun 1971, 1980, dan 1990 keadaan akhir Oktober
- 2) Tahun 2000 keadaan akhir Juni
- 3) Tahun 2003 keadaan akhir April
- 4) Tahun 2005 dan 2006 merupakan angka pertengahan tahun

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Selatan

Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan 1971 -2006



Tabel 2.2 menyajikan jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2006, jumlah penduduk terbesar berada di Kota Palembang dengan jumlah penduduk 1,373 juta jiwa. Kabupaten/kota yang lain umumnya jauh lebih kecil berkisar antara 115,9 ribu jiwa yang terkecil di Kota Pagaralam sampai dengan yang terbesar di Kabupaten Banyuasin dengan jumlah 759,2 ribu jiwa.

Tabel 2.2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000-2006

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk			Rata-rata LPP 2005-2006
	2000	2005	2006	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(01) Ogan Komering Ulu	1.053.194	256.245	259.968	1,19
(02) Ogan Komering Ilir	928.177	659.398	674.072	1,94
(03) Muara Enim	717.741	634.696	645.603	1,46
(04) Lahat	624.376	336.730	339.203	0,47
(05) Musi Rawas	585.111	476.287	485.588	1,68
(06) Musi Banyuasin	1.147.765	471.011	485.507	2,81
(07) Banyuasin		736.700	759.162	2,81
(08) OKU Selatan		318.519	323.185	1,19
(09) OKU Timur		558.186	566.297	1,19
(10) Ogan Ilir		358.380	366.285	1,94
(11) Empat Lawang		211.160	212.711	0,47
(71) Palembang	1.217.739	1.344.032	1.372.802	1,88
(72) Prabumulih		130.850	133.098	1,46
(73) Pagar Alam		115.010	115.854	0,47
(74) Lubuk Linggau		175.135	178.539	1,68
Sumatera Selatan	6.274.103	6.782.339	6.917.881	1,74

Sumber: BPS; SP2000, Supas 2005 dan Susenas 2006

Laju pertumbuhan penduduk antara kabupaten/kota dalam satu tahun terakhir juga cukup bervariasi. Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi yaitu 2,81 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk

terkecil terdapat di Kabupaten Lahat, Empat Lawang dan Kota Pagaralam, masing-masing sebesar 0,47 persen.

2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Perubahan tingkat kepadatan penduduk Sumatera Selatan terbilang cukup pesat. Pada tahun 1971 tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebesar 30 orang per km², naik menjadi 41 orang per km² pada tahun 1980, berubah menjadi 57 orang per km² pada tahun 1990, 65 orang per km² dan pada tahun 2000 kepadatan penduduk menjadi 72 per km². Ini berarti bahwa dalam jangka waktu kurang dari 30 tahun, kepadatan penduduk Sumatera Selatan menjadi lebih dari 3 kali lipat (Tabel 2.1). Namun demikian, pada beberapa tahun terakhir perubahan kepadatan penduduk mulai melambat sejalan dengan menurunnya pertumbuhan penduduk di Sumatera Selatan.

Penyebaran penduduk antar kabupaten/kota tampak masih cukup timpang, sehingga kepadatan untuk masing-masing kabupaten/kota belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah pedesaan untuk berusaha di daerah perkotaan. Masalah yang sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, setidaknya pembangunan yang dilaksanakan harus berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat, sehingga tidak menimbulkan urbanisasi.

Tidak meratanya persebaran penduduk Sumatera Selatan menyebabkan kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota sangat bervariasi. Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi mempunyai kepadatan penduduk yang paling besar, yaitu 3.661 orang per km², sedangkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan mempunyai kepadatan penduduk yang jauh lebih kecil. Kota Lubuklinggau, misalnya, yang mempunyai kepadatan penduduk paling besar setelah Kota Palembang, tingkat kepadatan penduduknya hanya 424 orang per km², Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir dan Musi Rawas memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih kecil meskipun mempunyai jumlah penduduk yang besar karena memiliki wilayah yang sangat luas.

Tabel 2.3. Kepadatan Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000-2006

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk Per Km ²		
		2000	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(01) Ogan Komering Ulu	2.917,60	90	87	89
(02) Ogan Komering Ilir	16.905,32	47	39	40
(03) Muara Enim	8.587,94	70	74	75
(04) Lahat	4.371,21	78	77	77
(05) Musi Rawas	12.134,57	36	39	40
(06) Musi Banyuasin	14.477,00	31	33	33
(07) Banyuasin	12.142,74	58	60	62
(08) OKU Selatan	5.403,01		59	60
(09) OKU Timur	3.356,04		166	168
(10) Ogan Ilir	2.666,09		134	137
(11) Empat Lawang	2.261,29		93	94
(71) Palembang	374,03	3.256	3.589	3.661
(72) Prabumulih	421,62	281	306	315
(73) Pagar Alam	579,16	182	198	200
(74) Lubuk Linggau	419,80	346	416	424
Sumatera Selatan	87.017,42	72	78	79

Sumber: BPS; Dihitung dari SP2000, Supas 2005 dan Susenas 2006

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 1980-2006 angka beban tanggungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 1980 rata-rata dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 88 penduduk tidak produktif. Pada tahun 1990 angka beban

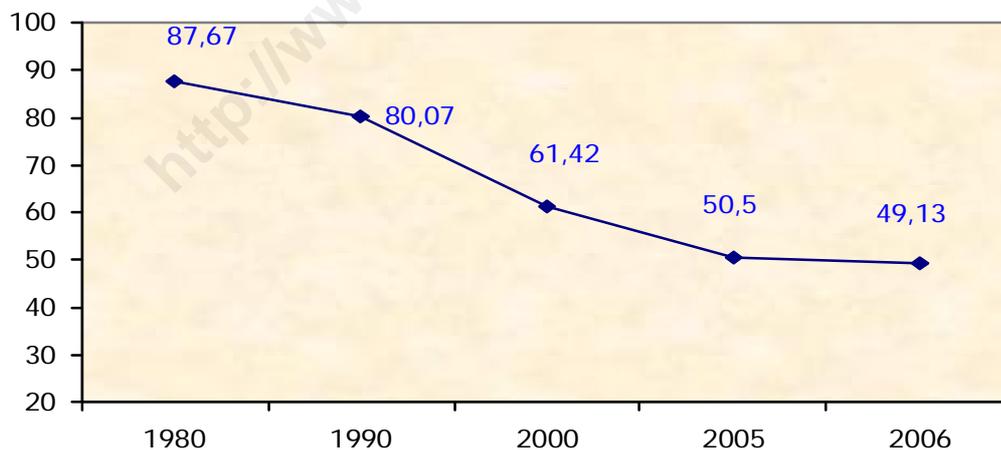
tanggungan penduduk Sumatera Selatan turun menjadi 80,07 persen dan pada tahun 2000 sebesar 61,42 persen. Saat ini (tahun 2006), angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi 49,13 persen.

Tabel 2.4. Persentase Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Tanggungan Tahun 1980-2006

Tahun	Kelompok Umur			Angka Beban Tanggungan
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1980	44,10	53,29	2,61	87,67
1990	41,68	55,53	2,78	80,07
2000	34,94	61,95	3,11	61,42
2005	30,24	66,45	3,31	50,50
2006	29,20	67,06	3,74	49,13

Sumber: BPS; SP80, SP90, SP2000, Supas 2005 dan Susenas 2006

Gambar 2.2. Angka Beban Tanggungan Provinsi Sumatera Selatan 1980 -2006



Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 2.4. menunjukkan bahwa pada tahun 1980 ada sebanyak

44,10 persen penduduk Sumatera Selatan yang berusia muda (0-14 tahun) dan turun menjadi 41,68 persen pada tahun 1990. Pada tahun 2000 proporsi penduduk usia 0-14 tahun adalah sebesar 34,94 persen, sedangkan pada tahun 2006 proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun menjadi 29,20 persen.

Struktur umur penduduk Sumatera Selatan berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (di bawah 15 tahun) saat ini sudah lebih rendah dari 40 persen, tetapi proporsi penduduk tuanya (usia 65+) masih kurang dari 5 persen. Proporsi penduduk usia 65 tahun atau lebih tahun 1980 hanya 2,61 persen dan meningkat menjadi 3,11 persen pada tahun 2000 dan meningkat kembali menjadi 3,74 persen pada tahun 2006.

Tabel 2.5. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Angka Beban Tanggungan Tahun 2006

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			Angka Beban Tanggungan
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(01) Ogan Komering Ulu	27,64	68,76	3,60	45,43
(02) Ogan Komering Ilir	28,20	67,66	4,14	47,81
(03) Muara Enim	29,74	67,19	3,08	48,84
(04) Lahat	30,53	64,90	4,56	54,07
(05) Musi Rawas	30,97	65,01	4,02	53,82
(06) Musi Banyuasin	31,01	64,89	4,10	54,11
(07) Banyuasin	28,92	68,73	2,35	45,49
(08) OKU Selatan	29,23	67,14	3,62	48,94
(09) OKU Timur	27,91	68,27	3,82	46,49
(10) Ogan Ilir	29,88	65,26	4,87	53,24
(71) Palembang	28,44	67,76	3,80	47,57
(72) Prabumulih	29,78	66,54	3,69	50,29
(73) Pagar Alam	28,32	66,53	5,15	50,31
(74) Lubuk Linggau	29,45	67,76	2,79	47,57
Sumatera Selatan	29,20	67,06	3,74	49,13

Sumber: BPS; Susenas 2006

Struktur umur penduduk tahap transisi ini juga ditemui di hampir seluruh kabupaten/kota. Menurut kabupaten/kota sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.5, proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) semuanya kurang dari 40 persen yaitu bervariasi antara 27,64 persen di Kabupaten OKU sampai yang tertinggi 31,01 persen di Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan proporsi penduduk lansia umumnya masih di bawah 5 persen yaitu antara 2,35 persen di Kabupaten Banyuasin sampai dengan 5,15 persen di Kota Pagaralam. Proporsi penduduk lansia di atas 5 persen hanya dijumpai di Kota Pagaralam.

Angka beban tanggungan antar kabupaten/kota bervariasi antara yang terkecil terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (45,43 persen) sampai dengan yang terbesar di Kabupaten Musi Banyuasin (54,11 persen). Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau juga mempunyai angka beban tanggungan yang cukup rendah. Rendahnya angka beban tanggungan di beberapa kabupaten/kota lebih disebabkan rendahnya proporsi penduduk usia muda sebagai akibat rendahnya fertilitas.

2.3 Fertilitas

Hasil Sensus Penduduk, SDKI dan Supas menunjukkan penurunan tingkat fertilitas dari wanita usia subur (TFR) dari waktu ke waktu. Usia 15-49 tahun merupakan usia subur bagi seorang wanita karena pada rentang usia tersebut kemungkinan wanita untuk melahirkan anak cukup besar. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1980 TFR di Sumatera Selatan diperkirakan sebesar 5,56 per 1000 wanita usia subur. Angka ini terus mengalami penurunan, berturut-turut 4,78 menurut hasil Supas 1985, menjadi 4,22 berdasarkan hasil SP 1990, menurut SDKI 1991 sebesar 3,43, hasil SDKI 1994 sebesar 2,87, hasil SDKI 1997 sebesar 2,3 dan menurut hasil SDKI 2002-2003 turun menjadi 2,3. Berdasarkan data terakhir yang dihitung dari Supas 2005, angka TFR di Sumatera Selatan kembali turun menjadi sebesar 2,2 per 1000 wanita usia subur.

Program Keluarga Berencana (KB) dan penundaan usia perkawinan pertama pada wanita merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat fertilitas di Sumatera Selatan karena berdampak memperpendek masa reproduksi mereka. Wanita yang kawin pada usia sangat muda mempunyai resiko cukup besar pada saat mengandung dan melahirkan yang berdampak terhadap keselamatan ibu maupun anak.

Dengan memberi kesempatan kepada wanita untuk bersekolah lebih tinggi dapat membantu menunda usia perkawinan bagi seorang wanita, terutama di daerah pedesaan.

Tabel 2.6. Beberapa Indikator Fertilitas Sumatera Selatan

Tahun	TFR	Persentase Wanita Hamil Usia 15-49 Tahun	Rata-rata ALH Wanita Usia 40-49 Tahun	Median Umur Persalinan Pertama Wanita Usia 25-49 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SP 1980	5,56			
Supas 1985	4,78			
SP 1990	4,22			
SDKI 1991	3,43	-	5,26	-
SDKI 1994	2,87	4,12	5,20	20,7
SDKI 1997	2,64	3,70	5,10	21,0
SDKI 2002-2003	2,3	2,5	4,4	20,6
Supas 2005	2,2			

Sumber: BPS; SDKI, 1991, 1994, 1997 dan 2002-2003; SP80; SP90; Supas 1985 dan 2005

Dari Tabel 2.7 terlihat bahwa secara umum dalam jangka panjang ada kecenderungan wanita mulai menunda usia perkawinan pertamanya. Pada tahun 1995 persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya berusia 16 tahun atau kurang masih cukup tinggi yaitu sebanyak 23,86. Lima tahun kemudian terjadi penurunan persentase wanita yang umur perkawinan pertamanya 16 tahun ke bawah yaitu 20,35 persen dan pada tahun 2005 angkanya menjadi dibawah 20 persen yaitu hanya 17,28 persen. Pada tahun 2007 persentase wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia 16 tahun kebawah sebesar 15,05 persen.

Keadaan itu selain disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anaknya juga di sebabkan oleh kecenderungan masyarakat terutama wanita untuk memilih bekerja, baik sebagai pembantu rumah tangga maupun buruh pabrik di perkotaan. Keadaan itu tidak terlepas dari pengaruh kemajuan teknologi yang berdampak

pada perubahan pola pikir yang akan membuka wawasan baru bagi wanita khususnya di perdesaan.

Tabel 2.7. Persentase Wanita Menurut Umur Perkawinan Pertama, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1995, 2000, 2005 dan 2007

Umur Perkawinan Pertama (Tahun)	Persentase			
	1995	2000	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ 16	23,86	20,35	17,28	15,05
17-18	28,40	25,39	26,52	26,65
19-24	41,75	44,78	46,27	47,09
25+	6,00	9,48	9,94	11,21
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 1995, 2000, 2005 dan 2006

Persentase wanita yang berumur perkawinan pertamanya 16 tahun ke bawah sangat bervariasi bila dilihat menurut kabupaten/kota. Pada tahun 2006 yang terendah adalah di Kota Lubuklinggau yaitu sebesar 9,24 persen. Selain itu ada beberapa kabupaten/kota lainnya yang persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya 16 tahun ke bawah cukup rendah yaitu , Kabupaten OKU (10,00 persen), Kota Palembang (10,07 persen), Kabupaten Muara Enim 10,26 persen), Kabupaten Banyuasin (10,40 persen), Kabupaten Ogan Ilir (12,44 persen dan Kota Prabumulih (15,67 persen). Sementara itu beberapa kabupaten masih terlihat cukup tinggi persentase wanita yang kawin pertamanya 16 tahun ke bawah, diantaranya Kabupaten OKU Timur (20,94), Kabupaten Ogan Komering Ilir (20,75 persen) dan Kabupaten Lahat (20,68 persen).

Tabel 2.8. Persentase Wanita Menurut Umur Perkawinan Pertama Menurut Kabupaten/Kota 2006

Kabupaten/Kota	Umur Perkawinan Pertama				Total
	<=16	17-18	19-24	25+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(01) Ogan Komering Ulu	10,00	27,38	54,98	7,64	100,00
(02) Ogan Komering Ilir	20,75	29,86	42,70	6,69	100,00
(03) Muara Enim	10,26	31,89	51,05	6,81	100,00
(04) Lahat	20,68	28,88	43,64	6,80	100,00
(05) Musi Rawas	19,62	33,58	40,39	6,41	100,00
(06) Musi Banyuasin	19,56	32,88	37,70	9,86	100,00
(07) Banyuasin	10,40	30,53	48,76	10,32	100,00
(08) OKU Selatan	16,21	25,69	49,58	8,51	100,00
(09) OKU Timur	20,94	25,69	45,60	7,77	100,00
(10) Ogan Ilir	12,44	26,51	47,79	13,26	100,00
(71) Palembang	10,07	15,65	51,35	22,92	100,00
(72) Prabumulih	15,67	20,64	48,07	15,62	100,00
(73) Pagar Alam	17,78	24,53	47,11	10,58	100,00
(74) Lubuk Linggau	9,24	21,60	55,80	13,36	100,00
Sumatera Selatan	15,05	26,65	47,09	11,21	100,00

Sumber: BPS; Susenas 2006

III. KESEHATAN

Salah satu aspek terpenting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain itu aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis obat yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

3.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan penduduk. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 1990, estimasi angka kematian bayi di Sumatera Selatan diperkirakan 71 per 1000 kelahiran, sedangkan berdasarkan SP 2000, angka kematian bayi di Sumatera Selatan turun drastis menjadi 53 per 1000 kelahiran, atau turun 25 persen selama 10 tahun atau rata-rata turun 2,5 persen per tahun. Angka kematian bayi di Sumatera Selatan terus mengalami penurunan hingga menurut hasil Supas tahun 2005 diperkirakan sebesar 27 per 1000 kelahiran.

Sejalan dengan menurunnya estimasi angka kematian bayi, maka estimasi angka harapan hidup mengalami kenaikan. Menurut hasil SP 1990, estimasi angka harapan hidup Sumatera Selatan adalah 59,83 tahun, sepuluh tahun kemudian mengalami kenaikan sebesar 7 persen, menjadi 64,02 tahun menurut SP 2000. Sedangkan menurut hasil Supas 2005 besarnya angka harapan hidup penduduk Sumatera Selatan adalah sebesar 70,6

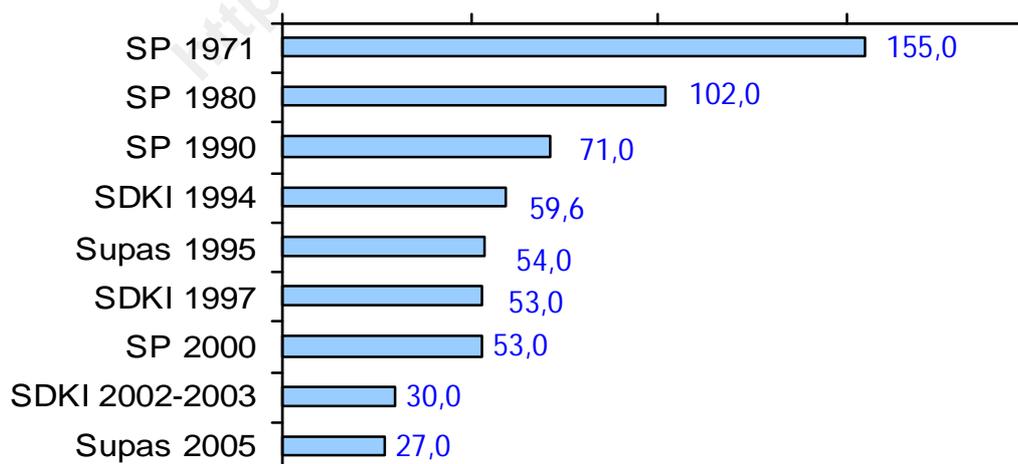
tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak yang baru lahir diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 70 tahun.

Tabel 3.1. Angka Kematian Bayi dan Anak serta Angka Harapan Hidup Sumatera Selatan

Tahun	Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Anak	Angka Harapan Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)
SP 1971	155		44,1
SP 1980	102		53,6
SP 1990	71		59,83
SDKI 1994	59,6	34,5	
Supas 1995	54		63,7
SDKI 1997	53	18,4	
SP 2000	53		64,02
SDKI 2002-2003	30	19,0	
Supas 2005	27		70,6

Sumber: BPS; SDKI, 1991, 1994, 1997 dan 2002-2003; SP80, SP90, Supas 1995 dan 2005

Gambar 3.1. Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera Selatan 1971-2005



Status kesehatan penduduk membarikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk dan biasanya dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan selama sebulan sebelum pencacahan hingga mengganggu aktifitas sehari-hari. Tabel 3.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu aktivitasnya pada tahun 2006 mengalami kenaikan dibanding keadaan tahun 2005, yaitu dari 24,21 persen pada tahun 2005 menjadi 25,24 persen pada tahun 2006. Sebaliknya di antara mereka yang terganggu kesehatannya, rata-rata lamanya sakit atau lamanya terganggu aktivitas sehari-harinya, mengalami penurunan, yaitu dari 5,23 hari pada tahun 2005 menjadi 5,14 hari pada tahun 2006.

Tabel 3.2. Angka Kesakitan Dan Rata-Rata Lama Sakit Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2005-2006

Kabupaten/Kota	Angka Kesakitan		Rata-rata Lama Sakit	
	2005	2006	2005	2006
(1)	(3)	(4)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu	23.78	31.68	4.09	4.47
(02) Ogan Komering Ilir	24.46	29.85	4.77	5.34
(03) Muara Enim	19.68	19.80	4.61	4.24
(04) Lahat	27.83	23.13	6.27	6.71
(05) Musi Rawas	27.41	32.55	5.75	4.59
(06) Musi Banyuasin	22.86	32.62	5.25	4.35
(07) Banyuasin	15.39	15.89	6.11	4.55
(08) OKU Selatan	27.97	16.12	4.63	5.79
(09) OKU Timur	21.13	22.51	5.34	5.66
(10) Ogan Ilir	29.07	21.58	6.24	6.03
(71) Palembang	28.07	30.50	4.82	5.06
(72) Prabumulih	16.97	16.81	4.68	7.04
(73) Pagar Alam	22.32	22.39	5.52	5.05
(74) Lubuk Linggau	30.86	24.84	4.02	4.66
Sumatera Selatan	24.21	25.24	5.23	5.14

Sumber: BPS; Susenas 2004, 2005 dan 2006

3.2 Pemberian ASI dan Imunisasi

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi karena selain mengandung nilai gizi yang cukup tinggi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Oleh karena itu semakin lama anak disusui akan semakin baik tingkat pertumbuhan dan kesehatannya. Pada tahun 2006 rata-rata lamanya balita disusui sebesar 16,75 bulan. Sedangkan lamanya balita disusui untuk daerah perkotaan lebih pendek dibandingkan daerah perdesaan, yaitu masing-masing 16,58 bulan dan 16,84 bulan. Angka-angka ini meningkat dibandingkan tahun 2005, di mana rata-rata lamanya balita disusui mengalami kenaikan dari 15,22 bulan pada tahun sebelumnya. Kenaikan juga terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan di mana pada tahun 2005 masing-masing sebesar 14,11 bulan dan 15,85 bulan.

Tabel 3.3 Rata-Rata Lama(Bulan) Balita Mendapat ASI Menurut Kabupaten/ Kota dan Daerah Tempat Tinggal, 2005-2006

Kabupaten/Kota	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu	14,24	13,93	14,05	21,80	15,89	17,15
(02) Ogan Komering Ilir	15,06	17,50	17,15	17,22	18,59	18,46
(03) Muara Enim	13,64	17,16	16,37	14,24	16,76	16,39
(04) Lahat	11,22	14,30	13,95	15,48	15,30	15,34
(05) Musi Rawas	16,77	14,50	14,53	8,77	18,64	18,55
(06) Musi Banyuasin	16,85	15,81	15,95	17,31	17,03	17,07
(07) Banyuasin	16,70	16,47	16,51	16,14	16,72	16,52
(08) OKU Selatan	10,33	17,00	16,78	16,38	14,60	14,74
(09) OKU Timur	17,19	15,57	15,67	15,05	16,11	15,96
(10) Ogan Ilir	12,57	15,57	15,16	15,71	17,72	17,44
(71) Palembang	13,51	16,00	13,54	16,99	19,67	17,06
(72) Prabumulih	15,74	16,50	15,93	16,68	19,05	17,33
(73) Pagar Alam	14,71	13,01	13,63	14,81	15,67	15,29
(74) Lubuk Linggau	16,74	19,19	17,34	14,59	12,81	13,87
Sumatera Selatan	14,11	15,85	15,22	16,58	16,84	16,75

Sumber: BPS, Susenas 2005 dan 2006

Selain pemenuhan ASI bagi balita, pemberian imunisasi juga sangat penting untuk memberikan kekebalan bagi balita terhadap berbagai jenis penyakit tertentu yang cukup berbahaya. Jenis imunisasi yang umum diberikan pada balita diantaranya BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis. Data pada Tabel 3.4 menunjukkan bahwa secara rata-rata balita di Sumatera Selatan pernah diberi 5 jenis imunisasi tersebut minimal sekali. Ada kecenderungan pemberian imunisasi di daerah perkotaan lebih sering dibandingkan daerah perdesaan. Sedangkan jenis imunisasi DPT dan Polio merupakan jenis yang paling sering diberikan karena sesuai ketentuan yang diberikan bahwa kedua jenis imunisasi ini diberikan kepada balita masing-masing sebanyak 3 kali.

Tabel 3.4 Rata-rata Frekuensi Imunisasi Balita Menurut Jenis Imunisasi dan Daerah Tempat Tinggal, 2005-2006

Jenis Imunisasi	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BCG	1,05	1,06	1,06	1,18	1,09	1,12
DPT	1,99	1,80	1,87	2,18	1,67	1,86
Polio	2,03	1,87	1,92	2,46	1,97	2,15
Campak/Morbili	0,74	0,88	0,83	1,04	0,99	1,01
Hepatitis B	1,51	1,40	1,44	1,81	1,31	1,49

Sumber: BPS; Susenas 2005 dan 2006

Bila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka frekuensi pemberian imunisasi balita relatif tidak banyak berbeda antar kabupaten/kota (Tabel 3.5). Artinya imunisasi telah mencakup seluruh wilayah Sumatera Selatan secara menyeluruh, salah satunya disebabkan karena adanya program pemberian imunisasi secara serentak melalui Pekan Imunisasi Nasional. Dari kelima jenis imunisasi tersebut, Kabupaten Banyuasin terlihat memiliki frekuensi imunisasi pada balita yang relatif rendah dibandingkan kabupaten/kota yang lain, sedangkan keempat kota yang ada di Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang,

Prabumulih, Pagaralam dan Lubuklinggau memiliki rata-rata frekuensi imunisasi balita cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya.

Tabel 3.5 Rata-rata Frekuensi Imunisasi Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, 2006

Kabupaten/Kota	BCG	DPT	Polio	Campak/ Morbilli	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(01) Ogan Komering Ulu	1,10	1,62	1,82	0,97	1,28
(02) Ogan Komering Ilir	0,94	1,61	2,27	0,98	1,45
(03) Muara Enim	1,19	1,86	1,98	1,12	1,55
(04) Lahat	1,11	1,69	2,17	1,01	1,27
(05) Musi Rawas	1,03	1,55	1,54	0,89	1,00
(06) Musi Banyuasin	1,03	1,85	2,33	0,93	1,38
(07) Banyuasin	1,07	1,31	1,37	0,87	0,97
(08) OKU Selatan	1,15	1,72	1,71	0,95	1,19
(09) OKU Timur	1,06	1,88	2,14	0,94	1,63
(10) Ogan Ilir	1,06	1,86	2,23	1,01	1,51
(71) Palembang	1,28	2,32	2,66	1,13	1,92
(72) Prabumulih	1,09	2,15	2,15	0,97	1,61
(73) Pagar Alam	1,01	2,63	2,66	0,96	2,39
(74) Lubuk Linggau	1,38	1,94	2,39	1,19	1,57
Sumatera Selatan	1,12	1,86	2,15	1,01	1,49

Sumber: BPS; Susenas 2006

3.3 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena dapat menjangkau penduduk sampai di pelosok. Namun ketersediaannya masih dirasakan sangat kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini. Pada Tabel 3.6 jumlah puskesmas yang tersedia selama periode 2004 – 2006 mengalami peningkatan, pada tahun 2004 tersedia 221 puskesmas, sedangkan pada tahun

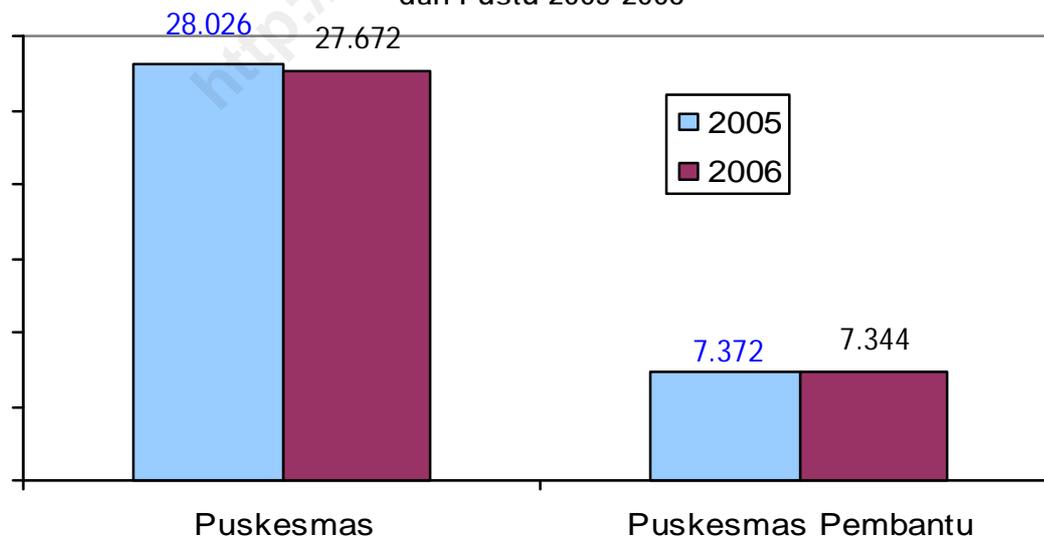
2006 menjadi 250 puskesmas. Sedangkan untuk jumlah puskesmas pembantu mengalami penurunan dari 944 pada tahun 2004, menjadi 942 pada tahun 2006. Jumlah Rumah Sakit pada tahun 2006 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2004, sedangkan jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit mengalami penurunan, yaitu dari 4.135 pada tahun 2004 menjadi 3.863 pada tahun 2006.

Tabel 3.6 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Tahun 2004 – 2006

Kabupaten/Kota	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit	35	39	45
Puskesmas	221	242	250
Puskesmas Pembantu	944	920	942
Tempat Tidur Rumah Sakit	4.135	4.680	3.863
Posyandu	6.201	6.349	5.786

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka, 2007

Gambar 3.2. Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Puskesmas dan Pustu 2005-2006



Dilihat dari rasio jumlah penduduk terhadap sarana kesehatan khususnya puskesmas dan puskesmas pembantu, ada kecenderungan rasio jumlah penduduk terhadap puskesmas menurun pada periode 2005-2006 (Gambar 3.2.). Ini berarti penambahan jumlah puskesmas belum mampu mengimbangi penambahan jumlah penduduk rasionya menurun. Pada tahun 2006, 1 puskesmas melayani sekitar 27672 penduduk.

Tabel 3.7 Persentase Bayi Menurut Penolong Persalinan dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006

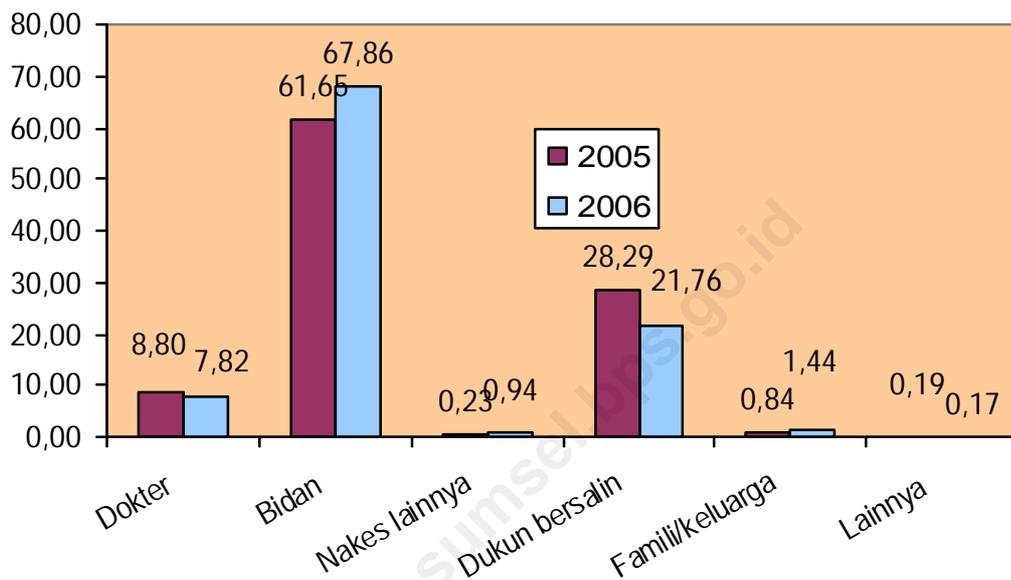
Penolong Persalinan	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dokter	19,18	2,98	8,80	13,31	4,55	7,82
Bidan	70,79	56,53	61,65	79,15	61,13	67,86
Nakes lainnya	0,26	0,21	0,23	0,27	1,34	0,94
Dukun bersalin	9,02	39,08	28,29	6,75	30,72	21,76
Famili/keluarga	0,42	1,07	0,84	0,52	1,98	1,44
Lainnya	0,33	0,12	0,19	-	0,27	0,17

Sumber: BPS; Susenas 2005 dan 2006

Hal penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan agar persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya). Pada tahun 2006 terdapat 76,62 persen persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan komposisi 7,82 persen oleh dokter, 67,86 persen oleh bidan dan 0,94 persen oleh tenaga kesehatan lainnya (Tabel 3.7). Dibandingkan tahun 2005, angka ini sedikit mengalami kenaikan dari 70,68 pada tahun 2005. Jika diamati peningkatan ini disebabkan meningkatnya persalinan yang dibantu oleh bidan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Meningkatnya persalinan yang dibantu bidan di daerah perkotaan diikuti oleh menurunnya persalinan yang ditolong dokter, akan tetapi di daerah pedesaan diikuti oleh meningkatnya persalinan yang ditolong oleh dokter. Patut

disyukuri bahwa persalinan yang ditolong oleh dukun bersalin mengalami penurunan pada periode 2005 – 2006 ini.

Gambar 3.3. Persentase Bayi Menurut Penolong Persalinan Provinsi Sumatera Selatan 2005 -2006



Persentase persalinan oleh dukun sebesar 21,76 persen tergolong masih tinggi. Ini berarti bahwa 1 dari 5 kelahiran di Sumatera Selatan masih ditolong dukun. Bahkan di beberapa kabupaten, angka persalinan oleh dukun sangat besar, seperti yang terjadi di Lahat, Musi Rawas, dan Ogan Ilir. Di daerah-daerah ini kelahiran yang ditolong oleh dukun di atas 40 persen (Tabel 3.8), artinya 1 dari 2 kelahiran ditolong oleh tenaga non medis. Tingginya persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga medis tentu saja meningkatkan resiko terjadinya kematian ibu maupun kematian bayi. Patut dicurigai tenaga-tenaga bidan desa yang ada di daerah-daerah tersebut relatif sedikit sehingga masyarakat memiliki akses yang terbatas pada tenaga kesehatan khususnya di daerah perdesaan.

Tabel 3.8 Persentase Bayi Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan , 2006

Kabupaten/Kota	Dokter	Bidan	Nakes Lainn ya	Dukun bersal in	Famili/ keluar ga	Lainn ya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(01) Ogan Komering Ulu	7,83	60,22	0,72	25,28	5,95	0,00	100
(02) Ogan Komering Ilir	4,36	76,91	0,00	18,21	0,00	0,51	100
(03) Muara Enim	4,90	67,56	1,13	21,87	4,54	0,00	100
(04) Lahat	4,01	51,71	0,46	41,98	1,84	0,00	100
(05) Musi Rawas	2,83	45,48	4,57	46,57	0,56	0,00	100
(06) Musi Banyuasin	2,58	53,99	3,15	33,19	6,70	0,39	100
(07) Banyuasin	8,33	70,18	0,00	20,73	0,00	0,76	100
(08) OKU Selatan	2,80	73,70	0,56	21,82	0,56	0,56	100
(09) OKU Timur	11,00	74,11	0,97	13,27	0,65	0,00	100
(10) Ogan Ilir	4,09	53,80	0,42	41,70	0,00	0,00	100
(71) Palembang	16,00	79,83	0,32	3,53	0,32	0,00	100
(72) Prabumulih	8,97	75,77	1,80	13,45	0,00	0,00	100
(73) Pagar Alam	5,32	78,31	0,00	15,32	1,05	0,00	100
(74) Lubuk Linggau	9,29	78,66	0,00	12,05	0,00	0,00	100
Sumatera Selatan	7,82	67,86	0,94	21,76	1,44	0,17	100

Sumber: BPS; Susenas 2006

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri maupun berobat jalan. Selama periode 2005 – 2006 nampak bahwa kecenderungan persentase penduduk yang mengobati sendiri menurun (Tabel 3.9), sebaliknya penduduk yang berobat jalan cenderung meningkat (Tabel 3.11). Penduduk yang mengobati sendiri sakitnya pada tahun 2005 sebesar 70,51 persen dan pada tahun 2006 menjadi 70,43 persen (Tabel 3.9). Bagi penduduk yang berobat sendiri pengobatan secara modern menjadi pilihan utama mereka, terbukti sebagian besar penduduk yang sakit menggunakan obat modern baik obat-obatan modern sendiri maupun bersama obat tradisional dan lainnya. Pada tahun 2006, penduduk yang memakai obat modern secara total mencapai 77,61 persen (41,90 persen menggunakan obat modern saja dan sisanya 35,71 persen menggunakan gabungan dari tiga jenis pengobatan

tersebut), sedikit menurun dibandingkan tahun 2005 yang besarnya 77,82 persen. Sementara yang menggunakan pengobatan tradisional saja juga mengalami penurunan dari 14,91 persen pada tahun 2005 menjadi 10,89 persen pada tahun 2006.

Tabel 3.9 Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Jenis/Cara Pengobatan Yang Digunakan, 2005 – 2006

Jenis/Cara Pengobatan	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Obat/cara modern	66,70	50,53	56,54	49,02	38,14	41,90
Obat/cara tradisional	8,85	18,49	14,91	6,96	12,96	10,89
Obat/cara lainnya	3,88	2,48	3,00	7,68	2,48	4,28
Obat/cara modern dan tradisional	10,61	16,44	14,27	13,24	22,34	19,19
Obat/cara modern dan lainnya	3,89	2,21	2,84	9,74	5,56	7,01
Obat/cara tradisional dan lainnya	4,84	3,94	4,28	6,01	7,88	7,23
Obat/Cara Modern, Tradisional dan Lainnya	1,22	5,92	4,17	7,36	10,64	9,51
Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri	69,95	70,85	70,51	68,64	71,41	70,43

Sumber: BPS; Susenas 2005 dan 2006

Dilihat dari variasi antar kabupaten/kota, penggunaan obat modern baik obat modern saja maupun bersama dengan cara tradisional atau lainnya relatif merata antar kabupaten, meskipun di beberapa kabupaten/kota penggunaan obat tradisional saja masih tinggi seperti dijumpai di Kota Prabumulih, Kabupaten OKU Selatan, Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Timur (Tabel 3.10)

Tabel 3.10 Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis/Cara Pengobatan Yang Digunakan, 2006

Kabupaten/Kota	Modern	Tradisional	Lainnya	Modern dan Tradisional	Modern dan Lainnya	Tradisional dan Lainnya	Modern, Tradisional dan Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(01) Ogan Komering Ulu	32,12	7,11	5,45	36,22	6,34	6,05	6,71	100
(02) Ogan Komering Ilir	39,07	14,68	3,41	18,09	7,95	10,75	6,06	100
(03) Muara Enim	49,95	9,97	2,77	17,95	11,28	2,13	5,94	100
(04) Lahat	48,11	13,88	2,74	27,03	2,40	3,90	1,93	100
(05) Musi Rawas	13,24	6,55	0,18	32,51	3,48	4,55	39,49	100
(06) Musi Banyuasin	49,74	12,60	2,02	17,76	0,78	12,87	4,21	100
(07) Banyuasin	58,96	10,92	3,58	4,83	2,93	12,26	6,51	100
(08) OKU Selatan	31,93	23,22	2,50	8,75	15,19	15,19	3,22	100
(09) OKU Timur	31,07	18,28	2,91	35,76	2,75	5,83	3,40	100
(10) Ogan Ilir	35,67	19,11	5,50	22,40	4,29	9,72	3,31	100
(71) Palembang	45,84	4,80	8,94	11,05	13,52	4,54	11,31	100
(72) Prabumulih	38,47	30,57	1,90	13,73	1,59	9,62	4,11	100
(73) Pagar Alam	38,24	6,12	4,49	32,45	4,18	9,73	4,80	100
(74) Lubuk Linggau	73,05	6,18	1,10	8,81	3,93	5,37	1,57	100
Sumatera Selatan	41,90	10,89	4,28	19,19	7,01	7,23	9,51	100

Sumber: BPS; Susenas 2006

Sedangkan bagi penduduk yang berobat jalan, jenis fasilitas kesehatan yang sering digunakan oleh penduduk adalah puskesmas (58,34 persen), kemudian praktek dokter (21,73 persen) dan petugas kesehatan lainnya (13,69 persen). Pada tahun 2006, penggunaan puskesmas masih cukup dominan baik di perkotaan maupun perdesaan. Perbedaan yang ditemui antara penduduk yang tinggal di perkotaan dibandingkan penduduk perdesaan adalah pada kunjungan terhadap praktek dokter. Penduduk perkotaan persentasenya lebih banyak yang memilih berobat jalan ke praktek dokter (35,30 persen), dibandingkan penduduk perdesaan (12,68 persen). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.11. Dibandingkan tahun 2005, terjadi peningkatan penggunaan fasilitas

puskesmas dan penurunan kunjungan pada praktek dokter dan praktek tenaga kesehatan lainnya.

Tabel 3.11 Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2005 – 2006

Tempat Berobat	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
RS Pemerintah	9,45	7,99	8,55	8,24	6,78	7,36
RS Swasta	5,00	4,22	4,52	5,42	3,47	4,25
Praktek Dokter/Poliklinik	35,89	17,37	24,43	35,30	12,68	21,73
Puskesmas/Pustu	44,71	57,23	52,46	48,84	64,67	58,34
Praktek Nakes	6,35	20,21	14,93	6,25	18,65	13,69
Praktek Batra	1,40	0,86	1,06	0,36	1,36	0,96
Dukun Bersalin	0,64	3,46	2,38	0,44	3,18	2,08
Lainnya	2,64	5,86	4,63	2,97	3,23	3,13
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan	27,01	26,29	26,56	31,38	25,89	27,84

Sumber: BPS; Susenas, 2005 – 2006

Menurut kabupaten/kota, jenis fasilitas berobat jalan yang paling sering dikunjungi bervariasi antar kabupaten/kota yaitu praktek dokter/poliklinik, puskesmas/pustu dan praktek nakes. Sebagian besar kabupaten memiliki fasilitas berobat jalan yang paling sering dikunjungi penduduk berupa puskesmas/pustu. Fakta yang sedikit berbeda dijumpai di dua kota yang ada di Sumatera Selatan yaitu Palembang dan Pagalam, di mana fasilitas yang paling sering dipilih umumnya adalah praktek dokter, sedangkan di Kabupaten Ogan Ilir dan OKU penduduk lebih sering mengunjungi praktek nakes. Data pada Tabel 3.12 juga memperlihatkan bahwa di semua kabupaten/kota terlihat kunjungan fasilitas pengobatan tradisional seperti praktek pengobatan tradisional (batra) dan dukun bersalin relatif kecil.

Tabel 3.12 Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat, 2006

Kabupaten/Kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktek Dokter/Praktek Klinik	Puskesmas/Pustu	Praktek Nakes	Praktek Batra	Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(01) Ogan Komering Ulu	2,88	2,52	20,91	41,45	38,73	2,16	0,36	3,17
(02) Ogan Komering Ilir	6,15	4,29	24,68	58,23	12,01	0,78	7,80	1,17
(03) Muara Enim	-	2,98	1,82	94,40	1,82	-	2,62	3,93
(04) Lahat	10,74	1,95	10,67	57,11	23,43	1,30	1,30	5,75
(05) Musi Rawas	4,63	1,72	11,61	58,63	32,11	-	1,72	3,45
(06) Musi Banyuasin	6,70	1,62	7,12	72,92	14,79	0,83	-	1,25
(07) Banyuasin	2,47	13,01	34,30	42,15	10,54	-	-	2,47
(08) OKU Selatan	21,38	2,14	11,44	65,04	3,21	1,07	2,14	2,14
(09) OKU Timur	8,76	4,15	15,21	53,92	28,57	1,84	2,30	2,76
(10) Ogan Ilir	8,93	4,16	19,30	37,08	44,71	8,45	4,77	6,61
(71) Palembang	7,04	5,99	36,26	53,30	2,89	0,26	0,26	2,89
(72) Prabumulih	15,89	10,62	10,49	56,46	1,34	1,34	1,27	7,88
(73) Pagar Alam	18,45	0,80	30,43	45,58	9,58	-	-	6,39
(74) Lubuk Linggau	39,46	2,98	14,76	37,65	2,78	-	1,29	6,43
Sumatera Selatan	7,36	4,25	21,73	58,34	13,69	0,96	2,08	3,13

Sumber: BPS; Susenas 2006

IV. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan proses pembudayaan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Mengingat pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Karena belum semua anak Indonesia dapat menikmati kesempatan pendidikan dasar, antara lain faktor kemiskinan keluarga.

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, bahkan semenjak tahun 1994 pemerintah juga melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dan sampai saat ini masih terus melanjutkan program wajib belajar 6 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentu akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk.

4.1. Angka Melek Huruf

Kemampuan baca tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Persentase penduduk yang melek huruf pada tahun 2006 mencapai 96,59 persen, sisanya penduduk yang buta huruf sebesar 3,41 persen. Angka melek huruf di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan pada kelompok umur 15-39 tahun sudah sangat tinggi (di atas 98 persen). Sementara pada penduduk usia 50 tahun ke atas di daerah perkotaan dan perdesaan yang melek huruf tercatat masing-masing 93,37 persen dan 85,50 persen. Ini berarti penduduk yang tidak dapat membaca atau buta huruf lebih

banyak dijumpai pada kelompok penduduk usia tua. Dibandingkan tahun 2005, angka melek huruf mengalami peningkatan baik di perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 4.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006

Kelompok Umur	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19	99,61	99,23	99,36	99,90	99,30	99,51
20-24	99,07	98,86	98,95	99,27	98,73	98,94
25-29	99,31	98,55	98,84	99,14	99,02	99,06
30-34	98,99	98,00	98,33	99,78	99,08	99,32
35-39	98,58	96,46	97,18	99,37	98,15	98,55
40-44	97,12	94,53	95,45	98,50	97,03	97,56
45-49	98,57	94,51	96,02	98,66	95,15	96,28
50+	93,36	81,14	86,56	93,37	85,50	88,14
Total	97,95	94,37	96,03	98,19	95,73	96,59

Sumber: BPS; Susenas, 2005 – 2006

Menurut jenis kelamin, angka melek huruf penduduk laki-laki pada tahun 2006 sebesar 98,04 persen lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan yang besarnya 95,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kaum wanita masih sedikit tertinggal dibandingkan laki-laki dalam hal kemampuan membaca dan menulis. Kondisi ini juga terjadi di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Tabel 4.2). Kesenjangan gender yang terbesar terjadi di Kabupaten Musi Rawas, diikuti Prabumulih dan OKU Timur, sedangkan kesenjangan gender yang paling kecil dapat dijumpai di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tabel 4.2 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2006

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	98,07	96,38	97,21
(02) Ogan Komering Ilir	95,74	93,48	94,62
(03) Muara Enim	98,39	95,79	97,13
(04) Lahat	98,71	94,96	96,91
(05) Musi Rawas	98,52	92,38	95,51
(06) Musi Banyuasin	97,05	93,71	95,42
(07) Banyuasin	97,59	94,25	95,93
(08) OKU Selatan	98,69	96,14	97,49
(09) OKU Timur	96,96	91,89	94,47
(10) Ogan Ilir	98,34	96,19	97,24
(71) Palembang	99,26	98,03	98,63
(72) Prabumulih	97,73	92,06	94,77
(73) Pagar Alam	98,62	96,02	97,38
(74) Lubuk Linggau	99,07	96,96	98,03
Sumatera Selatan	98,04	95,12	96,59

Sumber: BPS; Susenas 2006

4.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator lainnya untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun keatas. Di tingkat provinsi rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2006 baru mencapai 7,55 tahun berarti rata-rata baru sampai taraf pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada kelas dua. Dari sisi perbedaan jenis kelamin juga masih ditemui adanya kesenjangan gender di mana rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki 7,92 tahun dan perempuan 7,18 tahun (Tabel 4.3). Demikian juga dari sudut perbedaan daerah tempat tinggal masih ditemukan perbedaan yang cukup mencolok antara perkotaan dan perdesaan, di mana rata-rata lama sekolah di perkotaan sebesar

9,52 tahun sedangkan di perdesaan hanya sebesar 6,50 tahun. Meskipun demikian, hal yang perlu dicatat adalah bahwa jika diamati baik kesenjangan gender maupun kesenjangan antar daerah tempat tinggal tersebut cenderung menurun periode 2005 – 2006.

Tabel 4.3 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2005 – 2006

Jenis Kelamin	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	9,70	6,83	7,82	9,89	6,90	7,92
Perempuan	9,00	5,90	7,03	9,15	6,08	7,18
Total	9,34	6,37	7,42	9,52	6,50	7,55

Sumber: BPS; Susenas, 2005 – 2006

Untuk tingkat kabupaten/kota rata-rata lama sekolah tertinggi tercatat di Kota Palembang yang mencapai 9,94 tahun, dengan penduduk laki-laki rata-rata 10,32 tahun dan perempuan rata-rata 9,58 tahun (Tabel 4.4). Ini berarti penduduk laki-laki rata-rata sudah mengenyam pendidikan sampai SLTA kelas satu sedangkan penduduk perempuan secara rata-rata baru menamatkan tingkat Sekolah Menengah Pertama. Rata-rata lama sekolah terpendek terdapat Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu baru 5,96 tahun atau setara dengan kelas 6 Sekolah Dasar, di mana rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki 6,35 tahun dan perempuan 5,56 tahun.

Tabel 4.4 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2006

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	8,56	8,02	8,29
(02) Ogan Komering Ilir	6,35	5,56	5,96
(03) Muara Enim	7,52	6,66	7,11
(04) Lahat	7,37	6,52	6,96
(05) Musi Rawas	6,88	6,00	6,45
(06) Musi Banyuasin	6,92	6,15	6,54
(07) Banyuasin	7,33	6,50	6,92
(08) OKU Selatan	7,36	6,72	7,06
(09) OKU Timur	7,15	6,34	6,75
(10) Ogan Ilir	7,45	6,64	7,03
(71) Palembang	10,32	9,58	9,94
(72) Prabumulih	8,96	7,88	8,40
(73) Pagar Alam	8,61	8,20	8,42
(74) Lubuk Linggau	9,34	8,69	9,02
Sumatera Selatan	7,92	7,18	7,55

Sumber: BPS; Susenas 2006

4.3. Tingkat Pendidikan

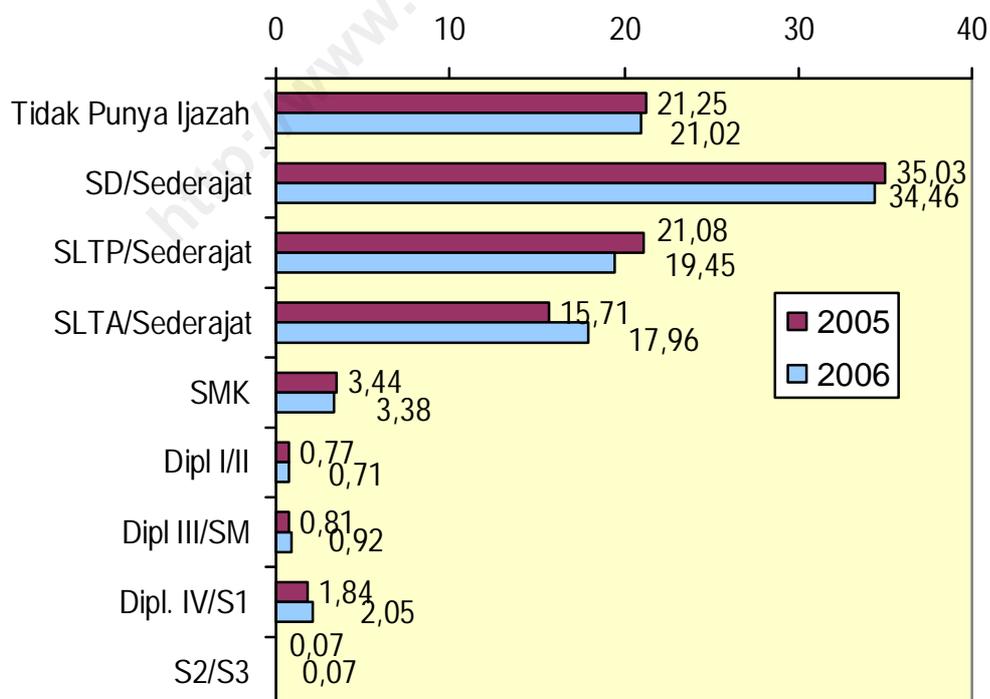
Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan pendudukan usia 15 tahun ke atas. Selama periode 2005-2006 penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah menamatkan sekolah pada jenjang Diploma III/SM DAN Diploma IV/S1 baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan cenderung mengalami peningkatan. Sebaliknya jenjang pendidikan SLTP ke bawah cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat pendidikan penduduk Sumatera Selatan pada periode 2005 – 2006 meskipun cukup kecil. Pada tahun 2006 penduduk 15 tahun ke atas yang berpendidikan Perguruan Tinggi sudah mencapai 3,74 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,49 persen. Pada jenjang pendidikan SD ke bawah terjadi penurunan dari 55,48 persen pada tahun 2005 menjadi 55,28 persen pada tahun 2006 (Tabel 4.5).

Tabel 4.5 Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006

Tingkat Pendidikan	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak Punya Ijazah	11,40	26,61	21,25	10,91	26,44	21,02
SD/Sederajat	22,60	41,81	35,03	21,03	41,66	34,46
SLTP/Sederajat	23,07	20,00	21,08	21,36	18,42	19,45
SLTA/Sederajat	28,36	8,81	15,71	32,19	10,32	17,96
SMK	6,53	1,75	3,44	6,24	1,84	3,38
Dipl I/II	1,40	0,42	0,77	1,25	0,42	0,71
Dipl III/SM	1,90	0,21	0,81	2,09	0,28	0,92
Dipl. IV/S1	4,53	0,38	1,84	4,75	0,60	2,05
S2/S3	0,20	0,00	0,07	0,17	0,01	0,07
Total	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS; Susenas, 2005 – 2006

Gambar 4.1. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 2006 -2007



Secara umum tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di daerah perkotaan lebih tinggi dari pada di daerah pedesaan. Hal ini ditunjukkan dengan lebih besarnya persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berpendidikan tinggi di daerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan. Terlihat bahwa persentase penduduk berpendidikan Perguruan Tinggi di daerah perkotaan pada tahun 2006 sebesar 8,26 persen sedangkan di daerah pedesaan hanya sebesar 1,31 persen, sebaliknya untuk yang di daerah pedesaan pendidikan SD ke bawah jauh lebih besar (68,10 persen) dibandingkan perkotaan (31,94 persen). Pola ini juga ditemui pada tahun sebelumnya.

Tabel 4.6 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2006

Kabupaten/Kota	Tidak Punya Ijazah	SD/Sed erajat	SLTP/ Sederaj at	SLTA/ Sederaj at	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu	16,58	29,30	22,59	27,06	4,47	100
(02) Ogan Komering Ilir	33,81	39,53	16,16	9,82	0,68	100
(03) Muara Enim	22,00	39,82	18,95	16,60	2,62	100
(04) Lahat	25,57	35,83	20,23	16,62	1,75	100
(05) Musi Rawas	23,45	47,53	16,78	10,97	1,28	100
(06) Musi Banyuasin	29,24	39,48	15,78	13,94	1,55	100
(07) Banyuasin	22,46	39,74	19,05	18,09	0,66	100
(08) OKU Selatan	16,99	45,78	21,80	14,42	1,01	100
(09) OKU Timur	27,30	34,28	20,84	14,60	2,99	100
(10) Ogan Ilir	21,66	42,68	18,13	14,23	3,30	100
(71) Palembang	9,43	17,86	21,32	41,41	9,98	100
(72) Prabumulih	15,84	28,20	21,53	27,42	7,01	100
(73) Pagar Alam	15,28	30,60	21,97	26,19	5,96	100
(74) Lubuk Linggau	10,19	28,35	21,41	34,13	5,92	100
Sumatera Selatan	21,02	34,46	19,45	21,33	3,74	100

Sumber: BPS; Susenas 2006

Menurut kabupaten/kota, tingkat pendidikan penduduk yang rendah ditemui di Kabupaten Musi Rawas, Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin, di mana pada ketiga daerah ini persentase penduduk yang berpendidikan SD ke bawah paling tinggi (di atas 65 persen). Sedangkan tingkat pendidikan yang tinggi ditemui di Kota Palembang, Pagaralam, Lubuklinggau dan Kota Prabumulih, di mana pada ketiga daerah ini persentase penduduk yang berpendidikan PT di atas 5 persen.

4.4. Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Tabel 4.7 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006

Umur	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 – 12	97,96	95,71	96,43	97,18	96,68	96,84
13 – 15	89,07	77,66	81,49	92,93	79,10	83,43
16 – 18	71,49	40,01	51,21	68,52	43,78	52,77
19 – 24	21,36	4,76	11,13	20,51	4,10	10,35

Sumber: BPS; Susenas, 2005 – 2006

Angka partisipasi sekolah anak-anak usia 7-12 tahun pada tahun 2006 telah mencapai 96,84 persen. Secara umum di daerah perkotaan angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan, meskipun perbedaannya relatif kecil. Pada kelompok umur 13-15 tahun (usia SLTP), angka partisipasi sekolah lebih kecil (83,43 persen) dan pada kelompok umur 16-18 tahun, angka partisipasi sekolah hanya sebesar 52,77 persen. Ini berarti bahwa masih ada 16,57 persen

penduduk usia SLTP yang tidak melanjutkan pendidikan dan 47,23 persen penduduk usia SLTA yang tidak melanjutkan pendidikan. Pada kedua kelompok umur ini (13-15 tahun dan 16-18 tahun) perbedaan antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan cenderung membesar (Tabel 4.7).

Tabel 4.8 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Umur, 2006

Kabupaten/Kota	7 – 12	13 – 15	16 – 18
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	98,61	92,32	75,89
(02) Ogan Komering Ilir	96,92	80,38	36,18
(03) Muara Enim	97,41	80,48	48,70
(04) Lahat	96,79	79,75	55,33
(05) Musi Rawas	96,83	76,13	35,75
(06) Musi Banyuasin	95,86	81,17	47,47
(07) Banyuasin	97,37	80,67	56,10
(08) OKU Selatan	96,17	82,92	48,01
(09) OKU Timur	96,56	84,10	42,28
(10) Ogan Ilir	95,82	79,87	45,34
(71) Palembang	97,05	92,76	66,49
(72) Prabumulih	94,85	87,19	60,33
(73) Pagar Alam	97,39	86,86	66,08
(74) Lubuk Linggau	96,09	89,51	58,12
Sumatera Selatan	96,84	83,43	52,77

Sumber: BPS; Susenas 2006

Angka Partisipasi Sekolah menurut kelompok umur per kabupaten/kota disajikan pada Tabel 4.8. Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun yang terendah dijumpai di Kota Prabumulih, kabupaten Ogan Ilir, dan Musi Banyuasin, sedangkan tertinggi di Kabupaten OKU, Muara Enim, Banyuasin, Kota Palembang dan Pagaralam. Pada usia 13-15 tahun partisipasi sekolah yang paling rendah ditemui di Kabupaten Musi Rawas, Lahat dan Ogan Ilir, sedangkan yang tertinggi berada di Kabupaten OKU dan Kota Palembang. Untuk

kelompok umur 16-18 tahun partisipasi sekolah terendah adalah di Kabupaten OKI dan Musi Rawas sedangkan tertinggi adalah di Kabupaten OKU dan Kota Palembang.

Lebih jauh tentang partisipasi sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni yaitu tingkat partisipasi penduduk kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun di masing-masing jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA. Tabel 4.9 menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan, angka partisipasi murni semakin kecil, mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dikaitkan dengan program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, angka pada Tabel 4.9 memberikan informasi bahwa program tersebut belum sepenuhnya berhasil karena angka partisipasi murni di tingkat SLTP pada tahun 2006 hanya sebesar 68,01 persen. Bahkan di daerah pedesaan, angka tersebut lebih rendah.

Tabel 4.9 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006

Umur	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	91,44	93,21	92,65	91,09	93,93	93,01
SLTP	68,23	55,80	59,97	75,18	64,73	68,01
SLTA	60,80	28,49	39,98	59,79	33,65	43,15

Sumber: BPS; Susenas, 2005 – 2006

Dilihat per kabupaten/kota, angka partisipasi murni jenjang SLTP ini hampir semua kabupaten/kota masih cukup rendah. Angka yang terendah terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Rawas sedangkan yang tertinggi di Kabupaten OKU dan Kota Lubuklinggau.

Tabel 4.10 Angka Partisipasi Murni Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2006

Kabupaten/Kota	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	92,57	81,59	67,63
(02) Ogan Komering Ilir	94,68	59,73	23,71
(03) Muara Enim	94,95	67,38	39,39
(04) Lahat	90,80	70,52	47,09
(05) Musi Rawas	94,28	60,62	31,29
(06) Musi Banyuasin	93,55	71,30	33,06
(07) Banyuasin	96,03	61,67	44,24
(08) OKU Selatan	94,34	63,90	40,59
(09) OKU Timur	92,95	69,26	30,49
(10) Ogan Ilir	91,80	69,53	40,08
(71) Palembang	90,91	73,84	57,15
(72) Prabumulih	88,06	60,21	50,88
(73) Pagar Alam	92,14	72,84	56,36
(74) Lubuk Linggau	87,98	79,91	51,20
Sumatera Selatan	93,01	68,01	43,15

Sumber: BPS; Susenas 2006

4.5. Fasilitas Pendidikan

Semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah, khususnya untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP harus diikuti dengan meningkatnya fasilitas pendidikan, terutama mengenai daya tampung ruang kelas, sehingga program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dapat berhasil. Guna mengatasi kekurangan daya tampung, pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan seperti menambah pembangunan unit gedung baru dengan prioritas pada daerah yang angka partisipasi sekolahnya masih rendah dan daerah terpencil, dan merehabilitasi gedung-gedung SD dan SLTP dengan prioritas gedung yang rusak berat serta mengangkat guru kontrak untuk ditempatkan pada sekolah yang kekurangan guru.

Perkembangan fasilitas pendidikan selama lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 4.11. Pada jenjang pendidikan SLTA selama tiga tahun terakhir tahun ajaran

2003/2004 – 2005/2006 tidak mengalami perubahan, di mana seorang guru mengawasi sekitar 13 murid. Rasio murid terhadap guru pada jenjang pendidikan SLTP selama tahun ajaran 2003/2004 – 2005/2006 agak berfluktuasi di mana pada tahun ajaran 2004/2005 setiap guru yang mengawasi sekitar 20 murid dan pada tahun ajaran 2005/2006 rasio murid terhadap guru pada jenjang pendidikan SLTP mengalami penurunan menjadi 14 murid. Pada jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2003/2004 rata-rata guru mengawasi sekitar 22 murid dan pada tahun ajaran 2004/2005 mengalami sedikit penurunan dimana setiap guru SD mengawasi rata-rata 20 murid dan pada tahun ajaran 2005/2006 kembali naik rata-rata menjadi 24 murid.

Tabel 4.11 Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Tingkat Pendidikan , 2003/2004 – 2005/2006

Tingkat Pendidikan	2003/2004	2004/2005	2005/2006
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	21,55	19,97	24,30
SLTP	15,06	19,94	13,81
SLTA	15,40	14,46	12,71

Sumber: BPS; Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2007

V. KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat dalam lapangan kerja, tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian. Di Indonesia, usia kerja yang digunakan untuk keperluan pengumpulan data ketenagakerjaan adalah usia 15 tahun atau lebih. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2006, jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja tercatat sebanyak 4,8 juta jiwa.

5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur. Makin tinggi angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan besaran-besaran yang mempengaruhi angka TPAK.

Tabel 5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006

Jenis Kelamin	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	81,19	87,33	85,16	79,36	89,08	86,01
Perempuan	41,52	63,88	56,15	39,21	62,21	53,39
Laki-laki + Perempuan	61,98	75,79	70,96	57,26	76,30	69,64

Sumber: BPS; Sakernas, Nopember 2005 dan Agustus 2006

Data Sakernas 2006 menunjukkan bahwa TPAK di daerah pedesaan mencapai 76,30 persen, sementara di daerah perkotaan hanya 57,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk pedesaan lebih tinggi partisipasinya dalam kegiatan ekonomi dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Pola ini ditemui juga pada tahun sebelumnya (Tabel 5.1). TPAK juga berbeda menurut jenis kelamin, di mana laki-laki mempunyai TPAK yang lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan TPAK laki-laki bersifat universal karena setiap laki-laki dewasa dituntut untuk mencari nafkah untuk dirinya maupun keluarganya. TPAK wanita dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pendidikan wanita, terbukanya kesempatan kerja bagi wanita, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat, seperti pandangan terhadap wanita yang bekerja di luar rumah dan sebagainya.

5.2. Tingkat Pengangguran Tingkat Terbuka (TPT)

Merupakan suatu hal yang umum, bahwa peningkatan penawaran tenaga kerja tidak selalu diikuti dengan peningkatan yang memadai pada permintaan tenaga kerja karena terbatasnya lapangan kerja yang ada. Sebagai akibatnya, sebagian tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan atau menjadi pengangguran.

Tingkat pengangguran di Sumatera Selatan mempunyai ciri bahwa TPT di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Diduga, di daerah pedesaan karena didominasi oleh sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja relatif tinggi. Penduduk usia kerja dengan mudah dapat bekerja di sektor pertanian meskipun sebagai pekerja keluarga atau pekerja bebas (buruh tani) karena tidak membutuhkan keahlian atau pendidikan yang tinggi. Sebaliknya di daerah perkotaan, lapangan pekerjaan formal lebih selektif dalam menerima tenaga kerja khususnya dengan tingkat pendidikan yang dipersyaratkan. Ciri lain adalah bahwa TPT perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini bisa dijelaskan bahwa kesempatan kerja perempuan cenderung lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Selain itu, pada momen-momen tertentu penduduk laki-laki lebih besar peluangnya untuk memasuki pasar kerja dibandingkan perempuan, sehingga angka pengangguran wanita menjadi tinggi.

Tabel 5.2 Tingkat Pengangguran Tingkat Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2006 – 2007

Jenis Kelamin	2005			2006		
	Perko- taan	Perde- saan	Total	Perko- taan	Perde- saan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	15,95	9,09	11,40	15,49	6,23	8,92
Perempuan	25,65	11,44	15,07	12,83	8,85	9,97
Laki-laki + Perempuan	19,10	10,07	12,82	14,48	7,25	9,33

Sumber: BPS; Sakernas, Nopember 2005 dan Agustus 2006

Tabel 5.2 juga menunjukkan bahwa pada periode 2005 – 2006 tingkat pengangguran terbuka menurun dari 12,82 persen pada tahun 2005 menjadi 9,33 persen pada tahun 2006. Di daerah perkotaan, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 19,10 persen pada tahun 2005 menjadi 14,48 persen pada tahun 2006, demikian juga di daerah pedesaan TPT menurun dari 10,07 persen pada tahun 2005 menjadi 7,25 persen pada tahun yang 2006.

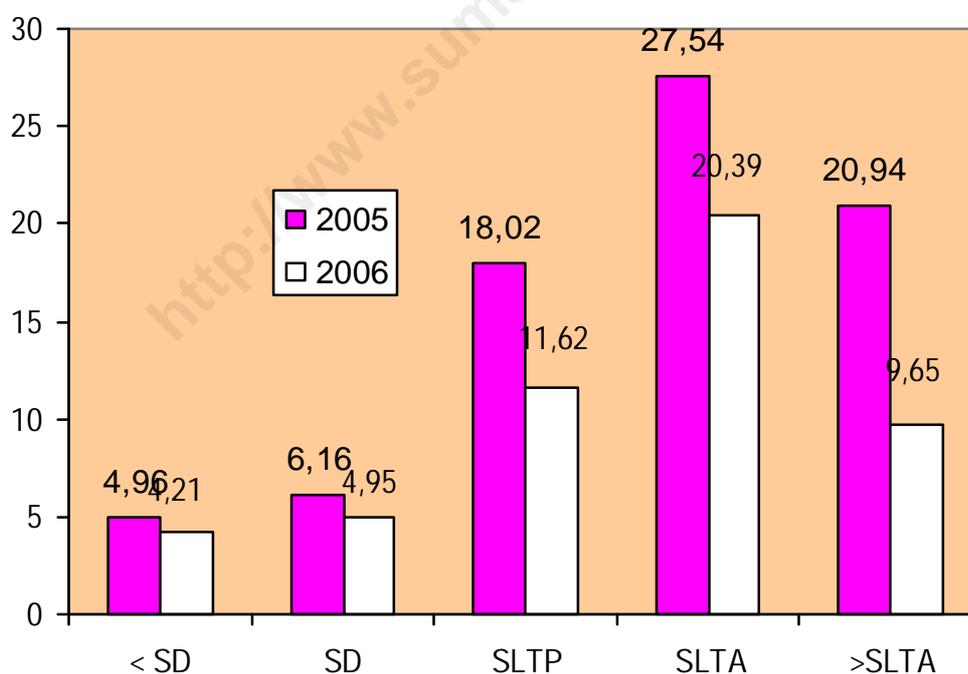
Tabel 5.3 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan tertinggi yang di tamatkan. Secara umum, tingkat pengangguran terbuka cenderung tinggi untuk mereka yang mempunyai pendidikan tinggi dan cenderung merendah untuk mereka yang berpendidikan rendah. Pada tahun 2006, tingkat pengangguran terbuka untuk mereka yang berpendidikan SLTA atau pendidikan yang lebih tinggi mencapai 9,65 persen. Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama tingkat pengangguran terbuka untuk mereka yang tamat sekolah dasar hanyalah 4,95 persen, sedangkan untuk mereka yang tidak/belum pernah sekolah adalah 4,21 persen. Untuk daerah perkotaan, tingkat pengangguran terbuka untuk mereka yang berpendidikan tinggi secara umum lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan.

Tabel 5.3 Tingkat Pengangguran Tingkat Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006

Pendidikan	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< SD	8,09	4,16	4,96	10,27	10,49	4,21
SD	10,32	5,26	6,16	9,81	4,06	4,95
SLTP	20,80	17,01	18,02	15,67	10,38	11,62
SLTA	25,64	30,56	27,54	18,81	22,72	20,39
>SLTA	24,38	5,30	20,94	11,03	5,17	9,65

Sumber: BPS; Sakernas, Nopember 2005 dan Agustus 2006

Gambar 5.1. TPT Menurut Pendidikan 2005 -2006



Angka pada Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat pengangguran terdidik di Sumatera Selatan. Masalah ini sebenarnya terjadi sudah sejak

lama dan sampai saat ini belum mendapatkan penyelesaian yang tepat. Pekerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi umumnya menginginkan pekerjaan di sektor formal padahal sektor ini mempunyai daya tampung yang sangat terbatas. Tidak dapat dielakkan, tingkat pengangguran terdidik menjadi sangat tinggi.

5.3. Lapangan Usaha Utama

Data tentang distribusi sektoral penyerapan tenaga kerja dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja dan juga sebagai tolok ukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Tahapan kemajuan perekonomian suatu negara dari tradisional menuju negara industri, salah satunya ditandai dengan adanya transformasi sektoral tenaga kerja dari sektor primer dengan produktivitas rendah ke sektor-sektor dengan produktivitas lebih tinggi yaitu sektor sekunder dan tersier. Sehingga, persentase tenaga kerja di sektor primer akan menurun dan sebaliknya pada sektor sekunder dan tersier akan meningkat.

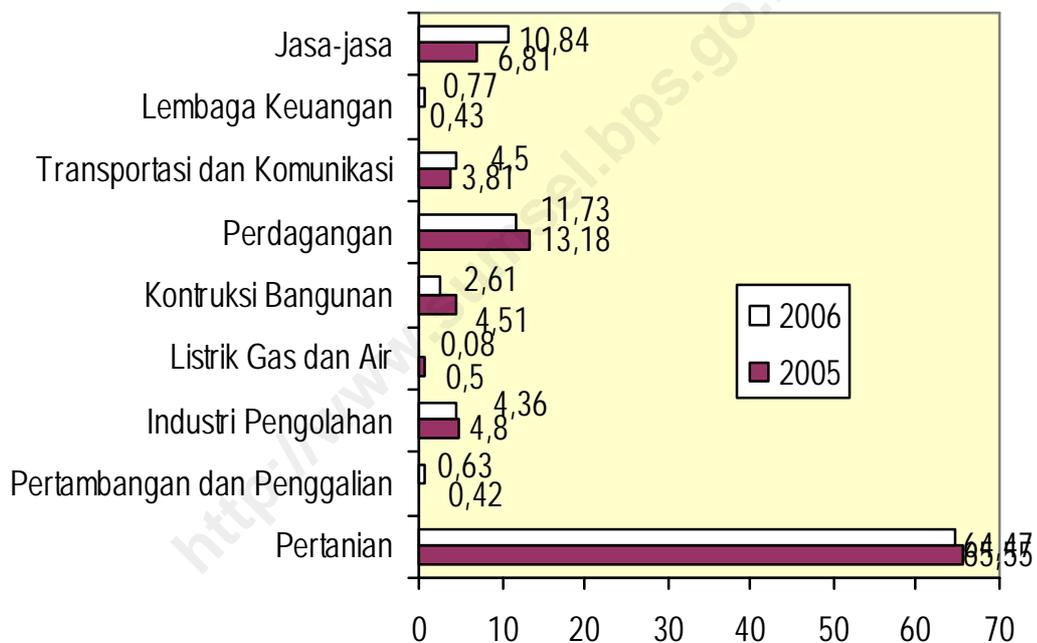
Tabel 5.4 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006

Lapangan Usaha Utama	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian	15,27	85,40	65,55	13,22	83,55	64,47
Pertambangan dan Penggalian	0,12	0,54	0,42	0,74	0,59	0,63
Industri Pengolahan	10,86	2,41	4,80	7,88	3,05	4,36
Listrik Gas dan Air	1,53	0,09	0,50	0,31	0,00	0,08
Konstruksi Bangunan	11,39	1,79	4,51	7,25	0,89	2,61
Perdagangan	33,53	5,14	13,18	27,09	6,02	11,73
Transportasi dan Komunikasi	8,37	2,00	3,81	9,39	2,69	4,50
Lembaga Keuangan	1,51	0,00	0,43	2,37	0,17	0,77
Jasa-jasa	17,41	2,63	6,81	31,76	3,05	10,84

Sumber: BPS; Sakernas, Nopember 2005 dan Agustus 2006

Sumatera Selatan masih tergolong sebagai provinsi agraris, hal ini karena sumbangan sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja dan terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) relatif masih dominan. Tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih cukup tinggi pada tahun 2006 (64,47 persen) meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun 2005. Setelah sektor pertanian, sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja khususnya di daerah perkotaan adalah sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa. Dibandingkan tahun 2005, daya serap sektor perdagangan menurun sedangkan sektor jasa-jasa meningkat.

Gambar 5.2. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama 2005 - 2006



5.4. Status Pekerjaan

Tabel 5.5 menyajikan distribusi persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan. Berdasarkan Sakernas 2005 dan 2006 menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai buruh/ karyawan meningkat dari 19,75 persen pada tahun 2005 menjadi hanya 21,72 persen pada tahun 2006. Demikian juga proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja dengan cara berusaha baik

berusaha sendiri, dibantu oleh pekerja tak dibayar maupun dibayar cenderung mengalami kenaikan.

Tabel 5.5 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006

Status Pekerjaan	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	25,69	10,73	14,97	22,88	12,81	15,54
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/brh tdk dibayar	9,39	33,95	27,00	8,07	34,77	27,53
Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar	2,81	0,95	1,48	2,85	1,06	1,54
Buruh/karyawan	47,81	8,67	19,75	51,83	10,51	21,72
Pekerja bebas pertanian	1,07	3,63	2,90	0,70	4,26	3,29
Pekerja bebas non pertanian	3,57	2,08	2,50	4,14	0,55	1,52
Pekerja tak dibayar	9,65	39,99	31,40	9,55	36,04	28,86

Sumber: BPS; Sakernas, Nopember 2005 dan Agustus 2006

5.5. Jumlah Jam Kerja

Aspek lain dari ketenagakerjaan adalah pemanfaatan tenaga kerja yang umumnya diukur dengan jam kerja. Isu jam kerja ini biasanya dihubungkan dengan setengah pengangguran atau pengangguran terselubung, artinya bahwa penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu) dianggap setengah menganggur karena dianggap belum menggunakan seluruh kapasitas sumber daya yang ada seperti tingkat pendidikan, skill dan keterampilan yang dimiliki atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diharapkan sehingga mereka masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain.

Lebih dari sepertiga (38,67 persen) pekerja di Sumatera Selatan bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu 35 jam seminggu. Angka ini cukup besar, dan tentu saja mengindikasikan adanya tingkat setengah pengangguran yang cukup besar. Jika pengangguran terbuka dan setengah pengangguran ini digabungkan, maka akan diperoleh angka yang cukup besar, mencapai hampir separuh dari angkatan kerja.

Tabel 5.6 Persentase Penduduk yang Bekerja Kurang dari 35 Jam Seminggu Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006

Jenis Kelamin	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	17,11	35,80	29,83	13,69	39,62	32,62
Perempuan	28,12	54,01	48,21	35,17	53,45	48,46
Total	20,39	43,24	36,77	21,94	44,89	38,67

Sumber: BPS; Sakernas, Nopember 2005 dan Agustus 2006

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa selama tahun 2005 – 2006 proporsi penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu juga meningkat baik mereka yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan. Pada tahun 2005, proporsinya lebih besar untuk mereka yang tinggal di daerah perdesaan (43,24 persen) di bandingkan di daerah perkotaan (20,39 persen). Demikian pula untuk tahun 2006, proporsi pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu di daerah perdesaan sebesar 44,89 persen sedangkan di daerah perkotaan hanya 21,94 persen.

VI. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan kemampuan ekonomi khususnya pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya kemampuan ekonomi penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi diantara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan (dalam hal ini didekati dengan data pengeluaran), akan memberikan petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai. Dari data pengeluaran dapat juga di ungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

6.1. Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan.

Dalam analisis kemiskinan di kenal beberapa indikator penting yang dapat dipergunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering di pergunakan adalah *head-count ratio* (P_0). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator ini mudah dihitung dan dipahami, namun demikian tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin. Oleh karena itu dikenal juga indikator kemiskinan yang lain, yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P_1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau P_2). Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap*

index atau P_1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P_2). Penurunan pada P_1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan pada P_2 mengidentifikasi berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Tabel 6.1 Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Berbagai Indikator, 2002 dan 2005

Indikator	2002			2005		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk Miskin	513,81	920,29	1.434,1	557,8	871,2	1.429,0
Persentase Penduduk Miskin	22,79	22,33	22,49	21,19	20,90	21,01
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)				4,82	3,30	3,83
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2)				1,55	0,88	1,11
Garis Kemiskinan	129.552	92.060	96.301	172.684	120.331	138.444

Sumber: BPS Sumatera Selatan

Di tingkat Provinsi Sumatera Selatan, jumlah penduduk miskin menurun dari 1,434 juta jiwa pada tahun 2002 menjadi 1,429 juta jiwa pada tahun 2005. Dalam hal persentase penduduk miskin (P_0), juga terlihat adanya penurunan, yaitu dari 22,49 persen pada tahun 2002 menjadi 21,01 persen pada tahun 2005. Penurunan persentase penduduk miskin ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan.

Dilihat dari segi kedalaman dan keberahan kemiskinan (P_1 dan P_2), insiden kemiskinan pada tahun 2005 dapat disebutkan bahwa besarnya P_1 adalah 3,83 dan angka P_2 sebesar 1,11. Dari angka-angka pada Tabel 6.1 di atas terlihat juga bahwa insiden kemiskinan di daerah perdesaan lebih dalam atau lebih parah dibandingkan daerah perkotaan.

Peliknya masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata dalam penanggulangannya, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan nasional, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas yang paling utama. Dalam Propenas 2004 – 2009 bahkan telah ditargetkan bahwa persentase penduduk miskin akan dapat diturunkan menjadi sekitar 14 persen pada tahun 2004. Guna dapat memenuhi target tersebut, penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk membantu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Program utama yang dicanangkan untuk itu meliputi penyediaan kebutuhan pokok utama keluarga miskin dan pengembangan budaya usaha masyarakat miskin. Namun mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, maka dalam menanggulangi kemiskinan dibutuhkan strategi penanggulangan yang komprehensif yang meliputi kebijakan makro dan lintas sektor.

6.2. Taraf Konsumsi Energi dan Protein

Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam unit kalori dan protein. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap komoditas makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap komoditas makanan tersebut. Kecukupan energi dan protein untuk tingkat konsumsi sehari-hari berdasarkan Widyakarya Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004 masing-masing sebesar 2000 kkal dan 52 gram protein.

Pada tahun 2002, besarnya rata-rata konsumsi energi masyarakat Sumatera Selatan sebesar 1.953,9 kkal per kapita per hari, masih di bawah standar kecukupan gizi menurut WNPG VIII. Demikian juga rata-rata konsumsi protein pada tahun 2002 telah masih di bawah standar kecukupan menurut WNPG VIII yaitu 50,0 gram per kapita per hari. Pada tahun 2005, angka konsumsi kalori maupun protein meningkat menjadi 1.990,3 kkal

per kapita per hari dan 54,51 gram protein per kapita per hari.. Kenaikan ini tentu saja merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat meskipun relatif kecil. Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, terlihat bahwa daerah perkotaan mempunyai konsumsi energi dan protein yang lebih rendah pada tahun 2005.

Tabel 6.2 Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 dan 2005

Indikator	2002			2005		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Energi (kkal)	1.864,5	2.002,8	1.953,9	1.905,8	2.035,0	1.990,3
Protein (gram)	51,80	49,02	50,00	56,05	53,69	54,51

Sumber: BPS Sumatera Selatan

6.3. Perkembangan Tingkat Kesejahteraan

Salah satu determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. Penurunan kemampuan daya beli akan mengurangi kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok. Meningkatnya kemampuan daya beli penduduk tentu saja diakibatkan meningkatnya pendapatan. Tabel 6.3 menunjukkan bahwa pada periode 2002 – 2005 secara rata-rata pendapatan penduduk Sumatera Selatan meningkat. Peningkatan pendapatan ini menyebabkan meningkatnya kemampuan daya beli penduduk dan akibatnya secara rata-rata konsumsi (pengeluaran) penduduk juga meingkat. Pengeluaran per kapita selama periode 2002 – 2005 meningkat sekitar 44 persen atau sebesar 15 persen per tahun.

Tabel 6.3 Beberapa Indikator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 dan 2005

Indikator	2002			2005		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendapatan Per Kapita Harga Konstan 2000 (000/Tahun)			6.040,1			7.318,2
Indeks Daya Beli			582,90			610,30
Rata-rata Konsumsi Per Kapita Sebulan (Rp)	235.603	129.650	167.104	330.234	192.566	240.198

Sumber: BPS Sumatera Selatan

6.4. Perkembangan Distribusi Pendapatan

Di samping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Terdapat dua indikator utama yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan. Indikator pertama adalah indikator yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Indikator ini mengukur tingkat pemerataan pendapatan dengan memperhatikan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang di golongkan sebagai berikut:

- a. Memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap tinggi,

- b. memperoleh 12 – 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap sedang,
- c. memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap rendah.

Berdasarkan kriteria tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, terlihat selama periode 2002 – 2005 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Sumatera Selatan tergolong rendah. Hal ini tampak dari persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terendah angkanya selalu di atas 20 persen. Persentase pengeluaran penduduk pada kelompok 40 persen terendah pada tahun 2002 adalah 33,02 persen, kemudian turun menjadi 21,66 persen pada tahun 2005.

Tabel 6.4 Distribusi Pembagian Pengeluaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 dan 2005

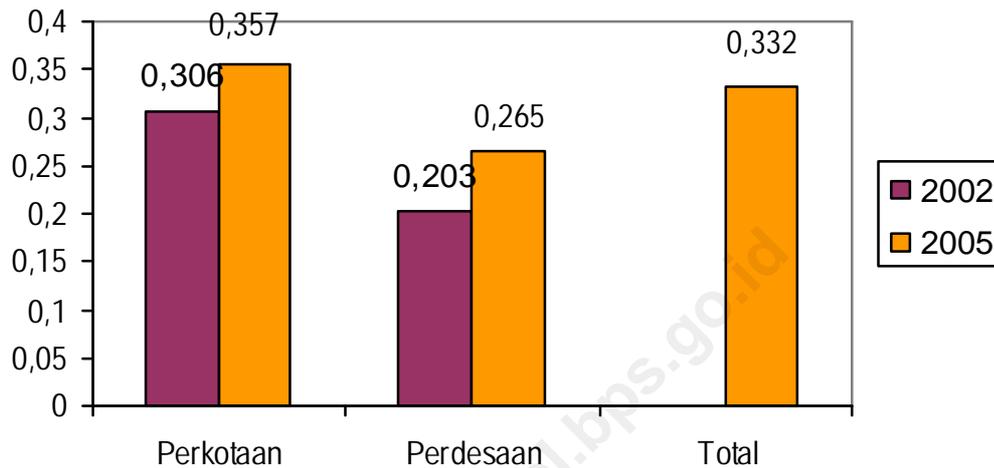
Indikator	2002			2005		
	Perko- taan	Perde- saan	Total	Perko- taan	Perde- saan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40 persen terendah	27,10	39,62	33,02	19,06	24,02	21,66
40 persen menengah	42,98	39,48	41,33	37,00	39,21	38,16
20 tertinggi	29,92	20,90	25,66	43,94	36,78	40,18
Gini Ratio	0,306	0,203	0,300	0,357	0,265	0,332

Sumber: BPS Sumatera Selatan, dihitung dari Susenas Modul Konsumsi

Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia dapat juga dipergunakan indikator yang lain, yaitu *Gini Ratio*. *Gini Ratio* tersebut juga dihitung dengan memanfaatkan data pengeluaran. Nilai dari *Gini Ratio* berkisar dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 di katakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Berdasarkan *gini ratio*, pada periode 2005 – 2007 secara keseluruhan terjadi penurunan ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan oleh menurunnya *gini ratio* dari 0,332 pada tahun 2005

menjadi 0,329 pada tahun 2007. Bila dikaitkan dengan bahasan sebelumnya, tampak bahwa selama periode 2005 – 2007 terjadi peningkatan daya beli masyarakat yang juga diikuti dengan penurunan ketimpangan pengeluaran.

Gambar 6.1. Gini Ratio Menurut Daerah 2002 -2005



6.5. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau di tabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 6.5 Persentase Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 dan 2005

Indikator	2002			2005		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan	55,81	71,64	63,75	61,35	68,32	59,62
Non Makanan	44,19	28,36	36,25	38,65	31,68	40,38
Total	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Sumatera Selatan

Berdasarkan Tabel 6.5 terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2005 lebih kecil dari pada tahun 2002. Persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2002 terhitung 63,75 persen, turun menjadi 59,62 persen pada tahun 2005. Sebaliknya persentase pengeluaran untuk bukan makanan pada tahun 2005 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2002. Hal ini dapat memberikan arti bahwa tingkat kesejahteraan penduduk pada tahun 2005 lebih baik di bandingkan tahun 2002.

VII. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Kebutuhan akan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Arti fisik perumahan/pemukiman yaitu tempat tinggal anggota masyarakat dan individu-individu yang biasanya hidup dalam ikatan perkawinan atau keluarga dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Rumah digunakan sebagai tempat berlindung terhadap gangguan dari luar dan sebagai tempat tinggal sehari-hari penghuninya yaitu sebagai tempat untuk tumbuh, hidup, berinteraksi dan fungsi lainnya. Oleh karena itu rumah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman bagi penghuninya dan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Data keadaan perumahan sangat penting terutama untuk menggambarkan salah satu dimensi kesejahteraan rumahtangga. Beberapa aspek yang dapat digambarkan dari data fasilitas perumahan antara lain adalah kelayakan dan kesehatan rumah yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tingkat pendapatan dan aspek-aspek lain. Untuk mengetahui bagaimana kondisi perumahan di Sumatera Selatan, pada bab ini akan diuraikan beberapa indikator perumahan dan pemukiman seperti kondisi fisik bangunan dan fasilitas tempat.

7.1. Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktunya, sehingga kondisi kesehatan perumahan sangat berperan sebagai media penularan penyakit di antara anggota keluarga atau tetangga sekitarnya. Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal(perumahan). Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga.

Pada tahun 2006 tercatat sebesar 35,45 persen rumah tangga di Sumatera Selatan yang tinggal di rumah yang relatif sempit, yaitu kurang dari 10 m² per anggota

rumah tangga. Rumah tangga tersebut proporsinya lebih banyak dijumpai di daerah perkotaan (41,51 persen) dari pada di daerah perdesaan (32,55 persen). Dibandingkan tahun 2004, kondisi luas rumah sedikit lebih baik di mana persentase rumahtangga yang menempati rumah dengan luas kurang dari 10 m² sedikit mengalami penurunan, khususnya di daerah perkotaan.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, 2004 – 2006

Jenis Kelamin	2004			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Luas Lantai Per Kapita Kurang dari 10 m ²	37,52	34,31	35,35	41,51	32,55	35,45
Lantai Bukan Tanah	96,71	84,28	88,33	94,78	84,72	87,97
Atap Layak	98,13	96,03	96,71	97,95	94,41	95,56
Dinding Permanen	99,42	96,45	97,42	99,45	96,76	97,63

Sumber: BPS; Susenas 2004 dan 2006

Selain dari luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Semakin banyak rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Karena lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit.

Pada tahun 2006 tercatat sebesar 12,03 persen rumah tinggal di Sumatera Selatan masih menggunakan tanah sebagai lantainya. Jika dilihat daerahnya persentase rumah tinggal berlantai tanah di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan, yaitu 15,28 persen daerah perdesaan dan 5,22 persen di daerah perkotaan. Hal

ini memberikan gambaran bahwa masih cukup banyak rumah tangga, khususnya di perdesaan, yang tinggal dalam rumah yang kurang sehat. Dibandingkan tahun 2004, jenis lantai rumah penduduk sedikit mengalami penurunan di mana proporsi yang berlantai bukan tanah menurun baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumah tinggal dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) tercatat sebesar 95,56 persen pada tahun 2006 atau menurun jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya (96,71 persen). Sedangkan rumah tinggal dengan dinding permanen pada tahun 2006 tercatat sebesar 97,63 persen, di mana di daerah perkotaan sebesar 99,45 persen dan di daerah perdesaan 96,76 persen. Seperti tampak pada tabel 7.1 kualitas perumahan di perdesaan pada umumnya relatif lebih rendah di bandingkan di daerah perkotaan.

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2006

Kabupaten/Kota	Luas Lantai Per Kapita Kurang dari 10 m ²	Lantai Bukan Tanah	Atap Layak	Dinding Permanen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(01) Ogan Komering Ulu	29,85	92,44	99,81	97,69
(02) Ogan Komering Ilir	19,87	75,89	94,42	97,10
(03) Muara Enim	37,88	90,74	98,25	98,37
(04) Lahat	43,01	95,74	98,80	93,47
(05) Musi Rawas	33,55	76,60	100,00	98,28
(06) Musi Banyuasin	42,68	84,26	88,60	99,12
(07) Banyuasin	33,18	90,61	91,59	98,66
(08) OKU Selatan	26,95	84,45	99,10	88,85
(09) OKU Timur	14,31	78,09	99,64	99,29
(10) Ogan Ilir	51,60	94,26	74,90	96,12
(71) Palembang	45,99	95,45	97,38	100,00
(72) Prabumulih	46,53	95,62	98,77	99,48
(73) Pagar Alam	42,89	96,90	99,82	94,48
(74) Lubuk Linggau	36,26	91,04	100,00	98,72
Sumatera Selatan	35,45	87,97	95,56	97,63

Sumber: BPS; Susenas 2006

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2006 maka akan ditemui kondisi rumah yang berkualitas rendah yaitu ditinjau dari luas lantai perkapita terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, OKU Timur dan OKU Selatan; ditinjau dari jenis lantai tanah terdapat di OKU Timur, Musi Rawas dan OKI; ditinjau dari jenis atap terdapat di Kabupaten Ogan Ilir dan Musi Banyuasin; serta ditinjau dari jenis dinding akan dijumpai banyaknya dinding yang tidak permanen di Kabupaten OKU Selatan (Tabel 7.2).

7.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersediannya sarana penerangan listrik, air bersih serta jamban sendiri dengan tangki septik.

Pada tahun 2006 tercatat sebesar 77,21 persen rumah tinggal di Sumatera Selatan telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Bahkan untuk daerah perkotaan penggunaan listrik untuk rumah tangga sudah hampir merata (96,71 persen). Sementara di daerah perdesaan, persentase rumah tangga pengguna listrik tercatat sebesar 67,89 persen.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2006 rumah tangga di Sumatera Selatan yang menggunakan air leding dan air dalam kemasan baru mencapai 21,28 persen. Pada umumnya pengguna air leding dan kemasan adalah rumah tangga di daerah perkotaan, yaitu sekitar 52,93 persen sedangkan di daerah perdesaan rumah tangga yang menggunakan air leding baru mencapai 6,16 persen. Sedangkan rumah tangga pengguna air bersih secara keseluruhan yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa, serta sumur/mata air terlindung dengan jarak ke tempat pembuangan limbah lebih dari 10 m, pada tahun 2006 tercatat sebesar 71,41 persen. Air minum leding dan kemasan juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2006.

Tabel 7.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, 2005 – 2006

Jenis Kelamin	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumber Penerangan Listrik				96,71	67,89	77,21
Air Minum Leding dan Kemasan	51,01	4,63	19,65	52,93	6,16	21,28
Air Bersih	91,55	67,06	75,00	88,01	63,49	71,41
Jamban Sendiri dengan Tangki Septik				60,89	19,98	33,21

Sumber: BPS; Susenas 2005 dan 2006

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko pencernaan yang mungkin di timbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Dari tahun ke tahun rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 tercatat sebesar 33,21 persen rumah tangga di Sumatera Selatan yang mempunyai jamban sendiri dengan tangki septik. Rumah tangga yang telah memiliki jamban sendiri dengan tangki septik proporsinya paling besar adalah rumah tangga perkotaan (60,89 persen di perkotaan berbanding 19,98 persen di perdesaan).

Tabel 7.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan, 2006

Kabupaten/Kota	Sumber Penerangan Listrik	Air Minum Leding dan Kemasan	Air Bersih	Jamban Sendiri dengan Tangki Septik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(01) Ogan Komering Ulu	78,23	24,61	75,32	43,91
(02) Ogan Komering Ilir	75,65	4,56	57,26	15,73
(03) Muara Enim	84,46	16,82	69,64	28,67
(04) Lahat	77,48	5,04	71,36	21,23
(05) Musi Rawas	60,78	2,80	73,26	19,93
(06) Musi Banyuasin	70,68	13,55	63,74	21,94
(07) Banyuasin	61,73	15,25	48,77	31,06
(08) OKU Selatan	39,37	12,60	54,70	22,78
(09) OKU Timur	72,93	3,17	85,92	27,14
(10) Ogan Ilir	81,64	13,88	70,51	24,61
(71) Palembang	98,82	69,00	87,62	63,35
(72) Prabumulih	94,96	14,07	90,97	45,26
(73) Pagar Alam	87,24	11,82	82,60	27,37
(74) Lubuk Linggau	93,30	24,23	90,97	64,92
Sumatera Selatan	77,21	21,28	71,41	33,21

Sumber: BPS; Susenas 2006

Fasilitas rumah dilihat menurut kabupaten/kota seperti disajikan pada Tabel 7.4 di atas, untuk penerangan listrik yang masih cukup rendah penggunaannya adalah di Kabupaten OKU Selatan. Penggunaan air leding dan kemasan kecuali di Kota Palembang umumnya masih cukup rendah khususnya di OKU Timur, Musi Rawas dan Lahat. Demikian juga penggunaan air bersih secara keseluruhan rata-rata masih cukup rendah kecuali di Kota Palembang yang mencapai 87,62 persen dan 3 kota lainnya yang juga cukup besar. Sedangkan penggunaan jamban sendiri dengan tangki septik juga umumnya kurang dari 50 persen penduduk, kecuali di Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau. Dengan demikian,

berdasarkan data-data pada Tabel 7.4 tersebut diketahui bahwa penggunaan fasilitas rumah yang sesuai standar kesehatan di Sumatera Selatan ternyata masih relatif rendah terutama berkaitan dengan penggunaan air bersih dan penggunaan jamban sendiri menggunakan tangki septik.

<http://www.sumsel.bps.go.id>

<http://www.sumsel.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Kapten Anwar Sastro 1131/1694
Palembang 30129